

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 17 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2006 – 2011



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



DRAFT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 – 2011

PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Agar pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan visi daerah, yaitu Kulon Progo, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program-program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dimaksud harus memiliki batasan waktu tertentu, dalam hal ini mencakup periode antara tahun 2006 sampai tahun 2011 (lima tahun).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan program kerja eksekutif pemerintah daerah yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan oleh kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kulon Progo, lahir dan batin.

Wates, 18 Juli 2007
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| 1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RPJMD | 2 |
| 1.4 HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA | 2 |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN | 3 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 4 |
| 2.1 KONDISI GEOGRAFIS | 4 |
| 2.2 PEREKONOMIAN DAERAH | 7 |
| 2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 7 |
| 2.2.2 Keuangan Daerah | 12 |
| 2.3 SOSIAL BUDAYA DAERAH | 13 |
| | 13 |
| | 16 |
| | 20 |
| | 20 |
| | 26 |
| 2.3.1 Kependudukan | 28 |
| 2.3.2 Kesehatan | 29 |
| 2.3.3 Pendidikan | 31 |
| A. Pendidikan Umum | 33 |
| B. Pendidikan Luar Sekolah | 34 |
| C. Kebudayaan | 35 |
| 2.3.4 Agama | 35 |
| 2.3.5 Kesejahteraan Sosial | 36 |
| 2.3.6 Pemberdayaan Perempuan | 38 |
| 2.3.7 Pemuda dan Olahraga | 38 |
| 2.3.8 Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 42 |

| | |
|---|----------|
| A. Tenaga Kerja | 44 |
| B. Transmigrasi | 47 |
| 2.4 PRASARANA DAN SARANA DAERAH | 48 |
| 2.4.1 Pertanian | |
| 2.4.2 Perindustrian dan Perdagangan | 50 |
| 2.4.3 Pertambangan dan Energi | 50 |
| 2.4.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 52 |
| 2.4.5 Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal | 53 |
| 2.4.6 Perhubungan, Transportasi, Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi | 54 57 |
| A. Perhubungan dan Transportasi | 57 |
| B. Telekomunikasi | 59 |
| C. Informasi dan Komunikasi | 61 |
| 2.4.7 Pariwisata | 62 |
| 2.4.8 Pekerjaan Umum | |
| A. Kebinamargaan | 67 |
| B. Pengairan | 67 |
| C. Keciptakaryaan | 68 |
| 2.5 PEMERINTAHAN UMUM | 69 |
| BAB III VISI DAN MISI | |
| 3.1 VISI | 80 |
| 3.2 MISI | 81 |
| | 83 |
| BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH | 84 |
| BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | 85 |
| 5.1 ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH | 89 |
| 5.3 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN | |
| | 97 |
| BAB VI KEBIJAKAN UMUM | |
| BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | |
| BAB VIII PENUTUP | |

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, Kabupaten Kulon Progo menerima banyak limpahan urusan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Dalam kaitan ini telah banyak kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempersiapkannya sekalipun peraturan perundangan pelaksanaannya masih belum ada.

Menyadari akan banyak pelimpahan urusan yang diberikan serta menyadari akan keterbatasannya maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan perubahan paradigma yang dikenal dengan paradigma baru. Perubahan mendasar dari paradigma baru adalah bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh tiga komponen utama yaitu unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu hal yang mutlak harus dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Penerapan otonomi daerah mestinya dapat diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun karena sifatnya masih relatif baru maka wajar apabila masih banyak dijumpai kendala. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, termasuk didalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (*guidance*) dan penentu arah pembangunan akan dilakukan. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang mencakup periode selama 20 tahun (tahun 2005 hingga 2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut terdiri dari empat rencana jangka menengah yang masing-masing mencakup periode lima tahun. Dokumen ini merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pertama yang mencakup periode waktu tahun 2006 sampai dengan 2011.

Selain sebagai penunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY dan laporan pertanggungjawaban Bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah sebagai pedoman bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RPJM DAERAH

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-Undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 - 2025).
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009.
- f) Peraturan Daerah Propinsi DIY No. ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi DIY.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14.tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005 – 2025).

1.4 HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 – 2008 serta mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan secara operasional diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan rencana tahunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 – 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lain, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah berisikan antara lain kondisi geografis, perekonomian daerah, keadaan statistik sosial budaya daerah, deskripsi dan statistik prasarana daerah dan deskripsi statistik pemerintahan umum.

BAB III VISI DAN MISI

Bab ini berisi uraian visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka arah kebijakan untuk lima tahun ke depan.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi strategi pembangunan daerah dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai payung roda perumusan program dan kegiatan pembangunan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan atau mencakup kebijakan tentang arah pengelolaan Pendapatan Daerah, arah pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan umum Anggaran.

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

Berisi uraian kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi Program Pembangunan Daerah dengan memperhatikan rancangan Renstra SKPD

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian tentang Program Transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi jabatan Kepala Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campuran 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197 Ha (0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315 Ha (5,65%).

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 110° 1' 37" - 110° 16' 26" Bujur Timur dan antara 7° 38' 42" - 7° 59' 03" Lintang Selatan. Curah hujan di Kulon Progo rata-rata per tahunnya mencapai 2.150 mm, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 106 hari per tahun atau 9 hari per bulan dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Suhu terendahnya lebih kurang 24,2°C (Juli) dan tertinggi 25,4°C (April), dengan kelembaban terendah 78,6% (Agustus), serta tertinggi 85,9% (Januari). Intensitas penyinaran matahari rata-rata bulanan mencapai lebih kurang 45,5%, terendah 37,5% (Maret) dan tertinggi 52,5% (Juli).

Bentuk morfologi daerah di bagian Selatan berupa dataran pantai, dataran rendah dan semakin ke Utara merupakan dataran bergelombang dan perbukitan. Daerah pegunungan berada di bagian Utara dan Barat serta lereng Selatan dari rangkaian pegunungan yang biasa disebut dengan pegunungan Menoreh.

Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi 7 (tujuh) buah mata air, Waduk Sermo, dan Sungai Progo. Mata air yang sudah dikelola PDAM meliputi mata air Clereng, Mudal, Grembul, Gua Upas, dan Sungai Progo. Di Kecamatan Kokap, mata air dikelola secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan Desa, yang kemudian disalurkan secara gravitasi dengan sistem perpipaan.

Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah. Aliran Sungai Progo dan Bogowonto selain membantu menjaga kondisi permukaan air tanah, juga membantu kegiatan irigasi untuk pertanian dan perikanan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya agar pencemaran air dan bencana banjir bisa ditekan.

Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data sekunder dan peninjauan lapangan, jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, dipelihara dengan baik, meskipun ada beberapa saluran irigasi yang tidak terawat, sehingga menimbulkan banjir pada beberapa daerah, khususnya di wilayah Ngestiharjo dan Karangwuni Kecamatan Wates dan di wilayah Nomporejo dan Karangsewu Kecamatan Galur. Pada umumnya jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai letak yang tidak begitu

jauh dengan jaringan jalan, bahkan pada beberapa ruas jalan jaringan irigasi dengan lebar yang besar menempel pada ruas jalan yang ada, seperti di ruas jalan Panjatan-Wahyuharjo dengan lebar jaringan irigasi \pm 4 meter. Jaringan irigasi sebagai bagian utama di dalam pengelolaan air tanah dan meningkatkan hasil pertanian, perlu dipelihara dengan baik. Setiap pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan letak jaringan irigasi yang ada, sehingga bisa menekan kemungkinan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo seperti yang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah tahun 2003-2013, sesuai dengan hirarkhinya dijelaskan sebagai berikut :

1. Hirarkhi kota-kota di Kabupaten Kulon Progo

a. Hirarkhi I, adalah kota Wates meliputi sebagian kecamatan Wates dan sebagian kecamatan Pengasih sebagai pusat kegiatan yang melayani seluruh wilayah Kabupaten yang berada di bawahnya, direncanakan melalui :

- 1) Pemantapan keterkaitan dengan kota-kota hirarkhi II dan III serta kota-kota pada wilayah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat untuk memperlancar arus lalu lintas.
- 2) Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memanfaatkan fungsi kota sebagai penahan arus urbanisasi dan migrasi penduduk untuk ke luar daerah.
- 4) Peningkatan penataan ruang kota dan penataan bangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh semua pihak.
- 5) Pengembangan sektor perekonomian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah-kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
- 6) Meningkatkan peran sebagai pusat pertumbuhan daerah bagian barat dari Propinsi DIY.

b. Hirarkhi II, terdiri dari kota Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot, dan Dekso, direncanakan sebagai pusat kegiatan tingkat II yang melayani wilayah kecamatan yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya, direncanakan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui upaya sektor swadaya masyarakat maupun swasta.
- 3) Pengembangan sektor perekonomian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah-kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
- 4) Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan permukiman).
- 5) Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarkhi I, II, dan III serta wilayah perbatasan.

- c. Hirarkhi III, terdiri dari kota Lendah, Kokap, Panjatan, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (wilayah kecamatan) yang melayani daerah sendiri, direncanakan melalui :
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan permukiman).
 - 3) Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarkhi I, II, dan III serta wilayah perbatasan.
2. Pola pemanfaatan ruang wilayah, terdiri dari :
- a. Kawasan lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan manfaat utama lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kehidupan dan penghidupan. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi dalam beberapa kelompok, meliputi : kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan atau ilmu pengetahuan, serta kawasan rawan bencana.
 - b. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian penduduk. Kawasan budidaya secara garis besar dikelompokkan meliputi : kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan.
 - c. Lokasi militer, merupakan lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan pemanfaatan lokasi militer sepenuhnya pada instansi yang berwenang.

2.2 PEREKONOMIAN DAERAH

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di suatu daerah yang ditunjukkan dari perhitungan PDRB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Kabupaten Kulon Progo tahun 2005, nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 1.465.477.000.000,-. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta iklim investasi yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan adanya kenaikan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 3,66%, berturut-turut naik menjadi 4,12% pada tahun 2002, 4,19% pada tahun 2003, dan sebesar 4,52% pada tahun 2004, serta 4,77% pada tahun 2005.

Adapun perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo selama enam tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah)

| No | Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 |
|----|---|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pertanian | 352.457 | 366.659 | 398 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 14.857 | 15.231 | 15 |
| 3. | Industri Pengolahan | 193.301 | 217.673 | 245 |
| 4. | Listrik, Gas dan Air Minum | 5.875 | 7.803 | 10 |
| 5. | Bangunan | 52.629 | 57.741 | 66 |
| 6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 199.709 | 227.899 | 251 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 103.912 | 120.169 | 140 |
| 8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 56.838 | 62.301 | 73 |
| 9. | Jasa-Jasa | 210.835 | 257.977 | 285 |
| | PDRB | 1.190.413 | 1.333.453 | 1.487 |
| | Penduduk Pertengahan Tahun | 370.965 | 370.788 | 370 |
| | PDRB Perkapita (Rp) | 3.208.963 | 3.596.268 | 4.017 |

Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo (dalam juta rupiah)

| No | Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 |
|----|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pertanian | 352.457 | 354.413 | 363.36 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 14.857 | 14.246 | 13.76 |
| 3. | Industri Pengolahan | 193.301 | 203.633 | 213.95 |
| 4. | Listrik, Gas dan Air Minum | 5.875 | 6.611 | 7.59 |
| 5. | Bangunan | 52.629 | 52.960 | 56.49 |
| 6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 199.709 | 211.339 | 215.00 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 103.912 | 110.783 | 119.14 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|----------|
| 8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 56.838 | 59.299 | 63.83 |
| 9. | Jasa-Jasa | 210.835 | 220.727 | 231.67 |
| | PDRB | 1.190.413 | 1.234.011 | 1.284.80 |
| | Penduduk Pertengahan Tahun | 370.965 | 370.788 | 370.28 |
| | PDRB Perkapita (Rp) | 3.208.963 | 3.328.077 | 3.469.75 |

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Inflasi di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2005 sangat fluktuatif. Pada triwulan pertama tahun 2005, angka inflasi mencapai 2,32 persen lebih dipengaruhi oleh naiknya BBM pada bulan Maret 2005. Hal ini membawa dampak pada naiknya harga-harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi masing-masing sebesar 2,60 persen dan 1,46 persen. Inflasi kelompok pengeluaran perumahan pada triwulan pertama mencapai sebesar 3,89 persen lebih dipengaruhi oleh naiknya pengeluaran biaya-biaya tempat tinggal pada bulan Januari 2005 sebesar 3,98 persen dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 2,28 persen.

Inflasi pada triwulan kedua dan ketiga relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya. Tercatat inflasi umum pada triwulan kedua sebesar 1,73 persen dan triwulan ketiga sebesar 1,69 persen. Besaran inflasi pada triwulan kedua lebih dipengaruhi oleh naiknya biaya-biaya pengeluaran tempat tinggal pada bulan Mei 2005 tercatat naik sebesar 3,71 persen dan pengeluaran penyelenggaraan rumah tangga pada bulan Juni 2005 naik sebesar 7,80 persen. Pada triwulan ketiga inflasi dipengaruhi oleh naiknya pengeluaran bahan makanan sebesar 2,99 persen pada bulan Juli 2005, dan naiknya pengeluaran kelompok sandang sebesar 2,45 persen pada bulan September 2005. Kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga memberikan sumbangan positif dengan catatan kenaikan indeks sebesar 0,70 persen pada bulan Agustus dan naik 0,75 persen pada bulan September 2005.

Keadaan inflasi pada triwulan keempat disajikan untuk keadaan pada bulan Oktober 2005. Tercatat inflasi sebesar 6,85 persen. Pengaruh utama kenaikan indeks ini adalah naiknya harga BBM pada awal bulan Oktober 2005. Indeks kelompok transport dan komunikasi naik sebesar 33,95 persen. Hal ini membawa dampak pada naiknya indeks kelompok bahan makanan dan perumahan masing-masing sebesar 7,56 persen dan 8,75 persen. Sedangkan kelompok sandang dan kesehatan masing-masing mengalami kenaikan indeks sebesar 2,76 persen dan 1,48 persen.

Tabel 2.3

Laju Inflasi di Kulon Progo

Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005

| Kelompok Pengeluaran | Laju Inflasi | | | |
|---|--------------|-------|-------|---------|
| | TRW 1 | TRW 2 | TRW 3 | TRW 4 * |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Umum | 2,32 | 1,73 | 1,69 | 6,85 |
| 1. Bahan Makanan | 2,60 | 0,04 | 3,76 | 7,56 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau | 1,46 | 0,30 | 1,21 | 0,85 |
| 3. Perumahan | 3,89 | 4,43 | 0,34 | 8,75 |
| 4. Sandang | 1,00 | 0,25 | 4,20 | 2,76 |
| 5. Kesehatan | 0,03 | 5,34 | 0,87 | 1,48 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga | 0,19 | 0,01 | 1,48 | 0,01 |
| 7. Transport & Komunikasi | 4,19 | 3,50 | 0,93 | 23,45 |

Keterangan : *) Keadaan bulan Oktober 2005

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Inflasi selama tahun kalender (Januari – Oktober) 2005 di Kulon Progo tercatat telah mencapai angka 13,11 persen lebih rendah dibandingkan dengan kota Yogyakarta untuk periode yang sama yaitu sebesar 13,91 persen. Kelompok pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi masing-masing mengalami inflasi sebesar 14,55 persen dan 3,86 persen. Kelompok perumahan, sandang dan kesehatan pada tahun kalender tercatat inflasi sebesar 8,75 persen, 2,76 persen, dan 1,48 persen. Sedangkan angka inflasi untuk kelompok pendidikan dan transport masing-masing tercatat sebesar 1,69 persen dan 34,36 persen.

2.2.2 Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo perkembangannya dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kulon Progo (Rp)

| Uraian | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. Pendapatan | 281.412.794.977 | 292.253.025.333 | 296.626.319.782 |
| a) PAD | 15.793.367.829 | 17.514.814.387 | 23.450.286.823,51 |
| b) Dana Perimbangan | 233.991.782.678 | 241.890.000.000 | 263.582.966.334,00 |
| c) Lain-lain Pendapatan yang sah | 31.627.644.470 | 32.848.210.946 | 14.301.000.000,00 |
| | | | |
| 2. Belanja | 281.401.742.831 | 306.546.950.971 | 300.780.321.416 |
| Aparatur Daerah | 39.671.002.480 | 37.201.528.319 | 40.602.698.774 |
| a) Belanja Adm. Umum | 26.033.204.440 | 27.568.255.011 | 32.244.591.497 |
| b) Belanja O&P | 8.926.602.150 | 6.418.108.108 | 7.719.041.977 |
| c) Belanja Modal | 4.711.195.890 | 3.215.165.200 | 639.065.300 |
| | | | |
| Pelayanan Publik | 241.730.740.351 | 269.345.422.652 | 260.177.622.642 |
| a) Belanja Adm. Umum | 146.000.203.824 | 175.295.775.500 | 188.851.623.480 |
| b) Belanja O&P | 45.878.086.355 | 36.361.598.697 | 40.038.914.424 |
| c) Belanja Modal | 31.318.944.900 | 25.263.449.300 | 13.164.100.900 |
| d) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan | 13.042.865.012 | 30.201.812.500 | 17.047.122.653 |
| e) Belanja tidak tersangka | 5.490.640.260 | 2.222.786.655 | 1.075.861.185 |
| | | | |
| 3. Pembiayaan | (11.052.146) | 23.293.925.638 | 4.154.001.634 |
| a) Penerimaan | 48.408.998.554 | 37.415.435.838 | 17.446.001.634 |
| b) Pengeluaran | 48.420.050.700 | 14.121.510.200 | 13.292.000.000 |

Sumber data : BPKD Kabupaten Kulon Progo

Distribusi anggaran belanja kedalam 11 (sebelas) bidang kewenangan selama tiga tahun terakhir (2003 s/d 2005) yang tertuang dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tabel 2.5
Distribusi Anggaran Belanja APBD Kabupaten menurut Bidang Kewenangan
Kabupaten Kulon Progo

| No | Bidang | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Bidang Umum Pemerintahan | 65.788.497.739,65 | 87.086.631.851,31 | 60.713.470.395,01 |
| 2. | Pertanian | 7.038.265.851,00 | 7.771.203.063,00 | 9.626.093.393,00 |
| 3. | Perekonomian | 4.490.252.407,00 | 4.553.993.042,00 | 4.318.513.091,00 |
| 4. | Kesehatan | 21.239.506.109,00 | 28.722.120.604,00 | 32.422.041.354,00 |
| 5. | Ketenagakerjaan | 3.221.391.015,00 | 3.332.125.749,00 | 2.785.143.924,00 |
| 6. | Pendidikan | 132.715.046.858,00 | 150.928.061.202,00 | 158.711.083.594,00 |
| 7. | Pekerjaan Umum | 46.533.813.241,00 | 32.026.801.008,00 | 23.065.465.988,00 |
| 8. | Sosial dan Kependudukan | 2.508.024.534,00 | 4.476.277.776,00 | 5.276.816.695,00 |
| 9. | Perhubungan | 2.728.810.400,00 | 1.598.221.537,00 | 1.623.638.825,00 |
| 10. | Lingkungan Hidup | 557.228.588,00 | 464.440.190,00 | 654.689.869,00 |
| 11. | Kebudayaan dan Pariwisata | 2.338.352.662,00 | 1.706.214.539,00 | 1.583.364.288,00 |
| | JUMLAH | 289.159.189.404,65 | 322.666.090.561,31 | 300.780.321.416,01 |

Sumber data : BPKD Kabupaten Kulon Progo

2.3 SOSIAL BUDAYA DAERAH

2.3.1 Kependudukan

Keadaan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan mobilitas yang tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan *efektivitas* penduduk yang tinggi. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo menurut Registrasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga
Di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Penduduk | | | Kepala keluarga |
|----|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah |
| 1 | 2001 | 217.357 | 227.964 | 445.321 | 91.596 |
| 2 | 2002 | 218.998 | 229.096 | 448.094 | 93.201 |
| 3 | 2003 | 220.563 | 230.615 | 451.178 | 95.014 |
| 4 | 2004 | 221.859 | 232.286 | 454.145 | 96.933 |
| 5 | 2005 | 223.232 | 233.831 | 457.063 | 98.523 |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

Sedangkan distribusi perkembangan tahapan keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tahapan Jumlah KK – Distribusi Prosentase Perkembangan Keluarga

| No | Tahapan Keluarga | Tahun | | | | | Pertumbuhan (%) | | | |
|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Pra KS | 45.352 (41,84) | 46.543 (41,92) | 45.951 (40,89) | 44.991 (39,18) | 45.471 (40,21) | 2,63 | (1,27) | (2,09) | 1,16 |
| 2 | KS I | 26.229 (24,20) | 27.441 (24,72) | 27.660 (24,61) | 28.147 (24,70) | 27.907 (24,67) | 4,62 | 0,80 | 1,76 | (0,86) |
| 3 | KS II | 18.116 (16,71) | 18.623 (16,77) | 20.182 (17,96) | 21.046 (18,47) | 20.543 (18,17) | 2,80 | 8,37 | 4,53 | (2,39) |
| 4 | KS III | 14.163 (13,07) | 13.832 (12,46) | 14.443 (12,85) | 15.382 (13,50) | 14.913 (13,19) | (2,34) | 4,42 | 6,50 | (3,05) |
| 5 | KS III+1 | 4.543 (4,19) | 4.485 (4,04) | 4.144 (3,69) | 4.381 (3,84) | 4.263 (3,77) | (1,28) | (7,60) | (5,72) | (2,69) |
| | Σ KK | 108.403 100 | 111.024 100 | 112.380 100 | 113.947 100 | 113.093 100 | | | | |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Sedang jumlah keluarga miskin yang menerima Bantuan Beras di Kabupaten Kulon Progo selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Beras
di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Σ KK Miskin |
|----|-------|-------------|
| 1 | 2000 | 46.316 |
| 2 | 2001 | 57.026 |
| 3 | 2002 | 35.487 |
| 4 | 2003 | 63.212 |
| 5 | 2004 | 63.821 |
| 6 | 2005 | 63.971 |

Sumber data : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pelaksanaan program Keluarga Berencana telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga untuk melaksanakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), bahkan telah menjadi bagian dalam tata kehidupan di masyarakat. Hal ini tercermin dari kecilnya angka rata-rata jumlah anak dalam keluarga, tingginya angka kesertaan KB, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat

partisipasi/peran serta masyarakat atau keluarga dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana. Keberhasilan program Keluarga Berencana dapat terlihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Peserta KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)

| No | Tahun | Pasangan Usia Subur (PUS) | Pertumbuhan PUS (%) | Peserta KB aktif | Pertumbuhan Peserta KB |
|----|-------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2001 | 60.136 | | 42.758 | |
| 2 | 2002 | 62.314 | 3,62 | 44.358 | 3,74 |
| 3 | 2003 | 63.055 | 1,19 | 45.092 | 1,65 |
| 4 | 2004 | 63.977 | 1,46 | 45.788 | 1,54 |
| 5 | 2005 | 64.386 | 0,64 | 49.108 | 7,25 |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

Penyelenggaraan program KB tidak hanya untuk menurunkan tingkat fertilitas semata, namun juga bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera dengan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pada tahun 2002 jumlah UPPKS sebanyak 1.010 kelompok dengan 48.493 anggota, yang mempunyai usaha mencapai 29.877 anggota dan tidak mempunyai usaha 18.616 anggota. Selanjutnya pada tahun 2003 jumlah UPPKS susut menjadi 788 kelompok, dengan jumlah anggota yang mempunyai usaha 19.173 anggota dan tidak mempunyai usaha 13.205 anggota, dan pada tahun 2004 jumlah UPPKS tersebut turun lagi menjadi 756 kelompok, dengan jumlah anggota yang mempunyai usaha 16.212 anggota dan tidak mempunyai usaha 11.843 anggota.

Sementara itu, dalam upaya pemberdayaan ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga berkualitas maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mengajak keluarga-keluarga untuk bergabung dan terlibat aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS). Para keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2002 sebanyak 11.544 keluarga dalam 575 kelompok. Tahun 2003 sebanyak 9.048 keluarga dalam 457 kelompok, dan tahun 2004 sebanyak 8.730 keluarga tergabung dalam 453 kelompok. Sementara para keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) pada tahun 2002 sebanyak 3.070 keluarga yang tergabung dalam 97 kelompok. tahun 2003 sebanyak 2.391 keluarga yang tergabung dalam 99 kelompok, dan tahun 2004 sebanyak 2.345 keluarga yang tergabung dalam 89 kelompok. Sedangkan para keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk tahun 2002 sebanyak 1.894 keluarga yang tergabung dalam 75 kelompok, tahun 2003 sebanyak 1.717 keluarga yang

tergabung dalam 66 kelompok, sedangkan untuk tahun 2004 sebanyak 1.599 keluarga yang tergabung dalam 64 kelompok.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan program KB di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengingat sasaran program KB dari tahun ke tahun mengalami penambahan baik dari aspek demografi maupun aspek kesejahteraan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan hasil pendataan keluarga dimana jumlah penduduk mengalami peningkatan, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bertambah, demikian pula dengan jumlah keluarga yang semakin besar.

2.3.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pencapaian pembangunan kesehatan dapat digambarkan melalui derajat kesehatan, perilaku sehat, lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan.

1) Derajat Kesehatan

Untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang meliputi umur harapan hidup, angka kematian, lingkungan sehat, pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

a) Umur harapan hidup

Dari estimasi secara nasional yang dilakukan oleh BPS, umur harapan hidup waktu lahir penduduk Indonesia pada tahun 2005 adalah rata-rata 67 tahun, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo mencapai rata-rata 73,1 tahun.

b) Angka kematian

Angka kematian bayi (AKB) tahun 2000 sebanyak 18,78/1000 kh, tahun 2001 sebesar 14,21/1000 kh, tahun 2002 sebesar 14,21/1000 kh, tahun 2003 sebesar 9,08/1.000 kh, tahun 2004 sebesar 10/1.000 kh, pada tahun 2005 berjumlah 28 (13,52/1000 kh). Jumlah kematian ibu tahun 2001 sebanyak 7 orang (109,56/1000), tahun 2002 sebanyak 11 orang (206/1000), tahun 2003 sebanyak 12 orang terdiri dari 1 orang kematian ibu hamil dan 11 kematian ibu bersalin, angka kematian ibu (AKI) sebesar 227,7/100.000 kh. Sedangkan tahun 2004 jumlah kematian ibu sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang kematian ibu hamil dan 3 orang kematian ibu bersalin, angka kematian ibu sebesar 75,245/100.000 kh. Untuk tahun 2005 angka kematian bayi adalah 5 orang (45,15/100.000 kh).

c) Status Gizi

Status gizi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang menggambarkan keadaan masyarakat. Dari data tiga tahun terakhir terlihat bahwa pencapaian beberapa cakupan program belum optimal, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kondisi tersebut antara lain sistem pendataan/pelaporan belum efektif, penyuluhan (KIE) petugas gizi belum

optimal serta kurangnya keterlibatan sektor terkait dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat.

Tabel 2.10
Status Gizi di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Status Gizi | Target | Hasil dicapai | | | | |
|-----|-------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Gizi lebih | < 2% | 0,38 % | 0,61% | 0,98% | 0,97% | 0,95% |
| 2 | Gizi baik | > 80% | 78,61% | 79,24% | 84,59% | 84,09% | 85,52% |
| 3 | Gizi kurang | < 20% | 20,00% | 18,74% | 13,36% | 13,65% | 11,61% |
| 4 | Gizi buruk | < 2% | 1,00% | 1,4% | 1,08% | 1,29% | 1,66% |
| 5 | Balita KEP | | 21,00% | 24,89% | 14,44% | 14,95% | 14,95% |
| 6 | Bumil KEK | < 10% | | 10,52% | 9,15% | 9,75% | 9,75% |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Indikator lain yang dapat menunjukkan status gizi dapat dilihat dari berat badan lahir rendah (BBLR < 2500 gram) pada tahun 2003 sebanyak 147 bayi dari 5.049 lahir hidup, tahun 2004 sebanyak 236 bayi dari 5.316 lahir hidup, tahun 2005 kematian bayi berjumlah 28 orang (13,52/1000 kh).

2) Perilaku Sehat

a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Hasil evaluasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada tahun 2003 tatanan rumah tangga desa dengan jumlah yang dipantau sebanyak 7.718 KK menunjukkan 87,70% sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Tahun 2004 dipantau sebanyak 8.820 rumah tangga menunjukkan 83,76% berperilaku PHBS.

b) Pembiayaan kesehatan masyarakat

Pada tahun 2003 penduduk yang mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 20,99% yang terdiri dari 9,28% peserta wajib ASKES dan 11,70% adalah keluarga miskin dengan Kartu Sehat. Sedangkan pada tahun 2004 penduduk yang mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 20,37% yang terdiri dari 9,05% peserta wajib ASKES dan 11,31% adalah keluarga miskin dengan Kartu Sehat.

c) Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

Tahun 2003 jumlah posyandu seluruhnya 935 pos. Dari jumlah tersebut strata posyandu purnama sebanyak 363 (38,82%) dan posyandu mandiri 132 (14,12%). Dari segi kuantitas, jumlah posyandu sudah cukup bagus, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan karena jumlah purnama dan mandiri masih kurang dari 60%. Tahun 2004 jumlah posyandu seluruhnya 938 pos. Dari jumlah tersebut strata posyandu purnama sebanyak 321 (34,22%), posyandu mandiri 95 (10,13%).

3) Lingkungan Sehat

a) Penyediaan air bersih

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003, penduduk Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai fasilitas air minum sendiri sebanyak 67.245 KK (66,65%), fasilitas air minum untuk bersama sebanyak 27.996 KK (27,75%) dan fasilitas air minum umum sebanyak 5.187 KK (5,14%). Sedangkan untuk tahun 2004 penduduk Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai fasilitas air minum sendiri sebanyak 67.675 KK (66,01%), fasilitas air minum untuk bersama sebanyak 20.225 KK (19,73%) dan fasilitas air minum umum sebanyak 13.366 KK (13,04%). Sedangkan sumber air minum berasal dari ledeng, pompa tangan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air minum dalam kemasan. Dari sumber air minum tersebut yang terbanyak digunakan oleh masyarakat adalah sumur terlindung sebanyak 52,51%, sumur tak terlindung sebanyak 24,01% dan mata air tak terlindung sebanyak 11,7%.

b) Penyehatan perumahan

Ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan di antaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal, jenis dinding terluas dan sumber penerangan. Kondisi perumahan masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2003, luas lantai terluas 74,34% bukan tanah, jenis dinding terluas 67,54% dari tembok dan penerangan listrik PLN mencapai 94,89%. Sedangkan kondisi pada tahun 2004 adalah lantai terluas 67,58% bukan tanah, jenis dinding terluas 65,79% dari tembok dan penerangan listrik PLN mencapai 97,50%.

c) Penyediaan jamban keluarga

Sistem pembuangan kotoran manusia erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit pencernaan. Berdasarkan Susenas tahun 2003 sebagian besar rumah tangga 77,53% telah mempunyai sistem pembuangan air besar sendiri. Tempat pembuangan air besar kebanyakan menggunakan model leher angsa sebesar 63,04%, diikuti model cemplung 30,46% dan plengsengan 6,15%. Sedangkan tempat pembuangan tinja terbesar menggunakan tangki 56,19% diikuti oleh lubang tanah 34,91% dan sungai 6,69% serta lainnya 2,21%. Untuk tahun 2004 tempat pembuangan tinja terbesar menggunakan tangki 59,08% diikuti oleh lubang tanah 32,29% dan sungai 4,67%, kolam 3,02% dan lainnya 0,32%.

d) Tempat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah industri

Jumlah pengamatan tempat pengelolaan sampah meliputi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak 46 buah dan secara keseluruhan memenuhi syarat dari jumlah yang diperiksa. Dalam pengelolaan limbah industri pada tahun 2003, industri yang mengelola limbah sesuai syarat kesehatan sebanyak 38 industri. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Kulon

Progo, baru 8 kecamatan yang mempunyai TPS. Dari jumlah tersebut masih terkonsentrasi di kecamatan Wates sebanyak 20 TPS (43,48%). Sedangkan volume sampah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 19.425 m³ dengan jumlah terbanyak di kecamatan Wates 16.425 m³ (84,55%).

e) Pemantauan tempat pengolahan makanan

Tempat pengolahan makanan yang berhasil dipantau pada tahun 2003 berhasil dipantau 1.169 tempat pengolahan makanan dan berhasil diperiksa sebanyak 483 buah (41,32%).

4) Pelayanan Kesehatan

a) Jumlah tenaga kesehatan telah mempunyai ijin praktik

Dokter Umum yang telah mempunyai ijin praktik sebanyak 82 orang, sehingga ratio tenaga terhadap penduduk 1 dokter : 5.486 penduduk. Dokter spesialis yang telah mempunyai ijin praktik sebanyak 19 orang, sehingga ratio tenaga terhadap penduduk 1 dokter : 23.674 penduduk. Dokter gigi yang telah mempunyai ijin praktik sebanyak 14 orang, sehingga ratio tenaga terhadap penduduk 1 dokter : 67.828 penduduk. Bidan praktik yang telah mempunyai ijin praktik sebanyak 99 orang, sehingga ratio tenaga terhadap penduduk 1 bidan : 4.543 penduduk.

b) Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan telah meluas ke seluruh kabupaten dengan dibangunnya rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu. Tahun 2004 jumlah puskesmas sebanyak 20 buah yang tersebar di 12 kecamatan. Dari jumlah tersebut 5 diantaranya sebagai puskesmas rawat inap dengan 88 tempat tidur. Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 61 buah, posyandu 938 buah, rumah bersalin (BP/RB) 7 buah, polindes 33 buah, apotek 5 buah dan rumah sakit 2 buah yang terdiri dari RSUD Wates dan RS Boro di kecamatan Kalibawang. Jumlah tempat tidur seluruh rumah sakit sebanyak 338 buah dengan pemanfaatan tempat tidur/*Bed Occupation Rate* (BOR) sebesar 88,48%.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 sebanyak 620 orang yang tersebar di unit-unit kesehatan. Distribusi ketenagaan berdasarkan unit kerja kesehatan sebagai berikut Dinas Kesehatan 60 orang, Puskesmas 411 orang dan RSUD Wates 149 orang. Sedangkan tahun 2005 jumlah tenaga kesehatan sebanyak 620 orang yang tersebar di unit-unit kesehatan. Distribusi ketenagaan berdasarkan unit kerja kesehatan sebagai berikut : Dinas Kesehatan 58 orang, Puskesmas 420 orang dan RSUD Wates 220 orang.

c) Pemberantasan penyakit

Penyakit menular yang paling menonjol di Kabupaten Kulon Progo adalah diare, TB paru, demam berdarah dengue (DBD) dan malaria. Dari hasil penemuan penderita penyakit diare tahun 2005 sebanyak 9.386 penderita, penyakit TB paru sebanyak 122 kasus, DBD 23 kasus dan malaria 248

kasus. Sedangkan pada tahun 2004 penderita penyakit diare sebanyak 6.884 orang, TB paru 109 kasus, DBD 237 kasus dan malaria 534 kasus. Adapun untuk penyakit malaria jenis parasit yang dominan adalah jenis Vifak dan Falsifarum.

2.3.3 Pendidikan

A. Pendidikan Umum

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan dan *output*/lulusan yang masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antar lain kebijakan pemerintah, mutu guru, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Kulon Progo telah mengalami kemajuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tersebut didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah, Guru, Murid di Kabupaten Kulon Progo

| No | KOMPONEN PENDIDIKAN | SATU AN | TAHUN PELAJARAN | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005 - 2006 |
| 1. | Taman Kanak-Kanak | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah | unit | 300 | 300 | 303 | 318 |
| | b. Rombongan Belajar/Kelas | unit | 328 | 333 | 337 | 357 |
| | c. Jumlah Siswa seluruhnya | orang | 6.023 | 6.226 | 6.523 | 6.834 |
| | d. Jumlah tenaga pengajar/Guru | orang | 744 | 756 | 781 | 855 |
| 2. | Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah : | unit | 381 | 381 | 381 | 396 |
| | - SD negeri dan swasta | | 372 | 372 | 372 | 371 |
| | - MI negeri dan swasta | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | b. Jumlah Rombongan Belajar/Kelas | unit | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.525 |
| | - SD negeri dan swasta | | 2.298 | 2.298 | 2.243 | 2.382 |
| | - MI negeri dan swasta | | 144 | 144 | 144 | 143 |
| | c. Jumlah Siswa Seluruhnya | orang | 39.628 | 39.728 | 38.645 | 39.373 |
| | - SD Negeri dan swasta | | 38.023 | 38.023 | 36.940 | 37.571 |
| | - MI negeri dan swasta | | 1.605 | 1.705 | 1.705 | 1.802 |
| | d. Jumlah tenaga pengajar/Guru | orang | 3.148 | 3.151 | 3.140 | 3.505 |
| | - SD negeri dan swasta | | 2.985 | 2.988 | 2.962 | 3.287 |
| | - MI negeri dan swasta | | 163 | 163 | 178 | 218 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah : | unit | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | - SMP negeri dan swasta | | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | - MTs negeri dan swasta | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | b. Jumlah rombongan belajar/ kelas : | unit | 624 | 624 | 634 | 705 |
| | - SMP negeri dan swasta | | 559 | 559 | 559 | 633 |
| | - MTs negeri dan swasta | | 65 | 65 | 75 | 72 |
| | c. Jumlah siswa seluruhnya : | orang | 19.100 | 19.102 | 19.337 | 19.829 |
| | - SMP negeri dan swasta | | 17.209 | 17.211 | 17.237 | 17.644 |
| | - MTs negeri dan swasta | | 1.885 | 1.891 | 2.100 | 2.185 |
| | d. Jumlah Tenaga pengajar/ Guru | orang | 1.804 | 1.807 | 1.842 | 1.969 |
| | - SMP negeri dan swasta | | 1.610 | 1.590 | 1.616 | 1.691 |
| | - MTs negeri dan swasta | | 194 | 217 | 226 | 278 |
| 4. | Sekolah Menengah | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah : | unit | 49 | 49 | 54 | 54 |
| | - SMA negeri dan swasta | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | - MA negeri dan swasta | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - SMK negeri dan swasta | | 25 | 25 | 30 | 30 |
| | b. Jumlah rombongan belajar/kelas : | unit | 502 | 502 | 403 | 508 |
| | - SMA negeri dan swasta | | 213 | 213 | 75 | 157 |
| | - MA negeri dan swasta | | 41 | 41 | 44 | 43 |
| | - SMK negeri dan swasta | | 248 | 248 | 284 | 268 |
| | c. Jumlah siswa seluruhnya : | orang | 19.951 | 16.051 | 15.260 | 15.012 |
| | - SMA negeri dan swasta | | 5.624 | 5.724 | 5.051 | 4.590 |
| | - MA negeri dan swasta | | 1.220 | 1.241 | 1.259 | 1.304 |
| | - SMK negeri dan swasta | | 9.107 | 9.086 | 8.950 | 9.118 |
| | d. Jumlah Tenaga pengajar/Guru | orang | 1.642 | 1.659 | 1.692 | 1.797 |
| | - SMA negeri dan swasta | | 590 | 582 | 576 | 572 |
| | - MA negeri dan swasta | | 150 | 153 | 153 | 147 |
| | - SMK negeri dan swasta | | 902 | 924 | 963 | 1.078 |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Peningkatan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

a) Angka Partisipasi Pendidikan

Akses pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK belum sebaik tingkat SMP/MTs maupun tingkat SD/MI. Pada Tahun 2002/2003, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/MA/SMK mencapai 76,90%. Angka tersebut masih berada jauh dibawah APK tingkat SMP/MTs yang telah mencapai 96,75% dan APK SD/MI sebesar 112,74%. Sedangkan pada Tahun 2004/2005 APK tingkat SMA/MA/SMK masih berada pada angka 75,05%, jauh berada di bawah tingkat SMP/MTs sebesar 107,51% dan tingkat SD/MI sebesar 104,80%. Pada tahun 2006/2006 APK tingkat SMA/MA/SMK sebesar 78,79% yaitu dibawah APK tingkat SD/MI sebesar 108,56% dan APK SMP/MTs sebesar 115,77%.

Demikian pula pada Tahun 2002/2003, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA/SMK sebesar 54,64%, masih cukup jauh dibawah APM SMP/MTs sebesar 69,83% dan tingkat SD/MI 93,19%. Tahun 2004/2005 APM tingkat SMA/MA/SMK turun menjadi 52,95%. Sedangkan APM tingkat SMP/MTs meningkat menjadi 78,36% dan SD/MI sebesar 88,72%. Pada tahun 2005/2006 APM tingkat pendidikan SD/MI sebesar 92,29%, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 85,50% dan tingkat pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 55,04%. Menurunnya APM pada tingkat SMA/MA/SMK tersebut perlu mendapat perhatian, khususnya bila dikaitkan dengan program perintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.12
APK dan APM Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Tahun Ajaran | Jumlah SD/MI | Jumlah Siswa Seluruhnya | APK | APM |
|-----|--------------|--------------|-------------------------|----------|---------|
| 1. | 2002-2003 | 407 | 39.838 | 112,74 % | 93,19 % |
| 2. | 2003-2004 | 399 | 39.318 | 109,6 % | 92,25 % |
| 3. | 2004-2005 | 399 | 37.788 | 104,80 % | 88,72 % |
| 4. | 2005-2006 | 396 | 37.571 | 108,56% | 92,29% |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.13
APK dan APM Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Tahun Ajaran | Jumlah SMP/MTs | Jumlah Siswa Seluruhnya | APK | APM |
|-----|--------------|----------------|-------------------------|----------|---------|
| 1. | 2002-2003 | 83 | 19.212 | 96,75 % | 69,83 % |
| 2. | 2003-2004 | 83 | 19.102 | 108,73 % | 77,27 % |
| 3. | 2004-2005 | 82 | 19.302 | 107,51 % | 78,36 % |
| 4. | 2005-2006 | 83 | 19.829 | 115,77% | 85,50% |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.14
APK dan APM Tingkat SMA, Madrasah Aliyah dan SMK
Di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Tahun Ajaran | Jumlah SMA/MA/SMK | Jumlah Siswa Seluruhnya | APK | APM |
|-----|--------------|-------------------|-------------------------|---------|---------|
| 1. | 2002-2003 | 49 | 16.726 | 76,90 % | 54,64 % |
| 2. | 2003-2004 | 51 | 16.051 | 80,85 % | 58,57 % |
| 3. | 2004-2005 | 54 | 15.260 | 75,05 % | 52,95 % |
| 4. | 2005-2006 | 54 | 15.012 | 78,79% | 55,04% |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

b) Angka Putus Sekolah dan Mengulang Kelas

Angka Mengulang Kelas pada SD/MI selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dari 6,04% pada Tahun 2002/2003 menjadi 6,034% di tahun 2004/2005, dan pada tahun 2005/2006 4,91%. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs, angka mengulang kelas sangat rendah, yaitu 0,20% pada tahun 2002/2003 dan 0,19% di tahun 2004/2005 dan pada tahun 2005/2006 0,13%. Demikian pula angka mengulang kelas pada tingkat SMA/MA/SMK sangat rendah, pada tahun 2002/2003 sebesar 0,33% dan di tahun 2004/2005 sebesar 0,17% dan pada tahun 2005/2006 sebesar 0,65%. Masih relatif tingginya angka mengulang kelas, khususnya pada tingkat SD/MI, perlu mendapat perhatian, terlebih pada kelas-kelas awal, karena seringkali menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah pada SD/MI.

Tabel 2.15
Angka Putus Sekolah dan Mengulang Kelas
di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun Ajaran | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
|----|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| | | Jml Siswa | Siswa Mengulang | Putus Sekolah | Jml Siswa | Siswa Mengulang | Putus Sekolah | Jml Siswa | Siswa Mengulang | Putus Sekolah |
| 1. | 2002-2003 | 39.838 | 2.406 | 21 | 19.212 | 39 | 84 | 16.726 | 55 | 170 |
| 2. | 2003-2004 | 39.318 | 2.108 | 47 | 19.102 | 21 | 70 | 16.051 | 36 | 211 |
| 3. | 2004-2005 | 37.788 | 2.284 | 89 | 19.302 | 36 | 63 | 15.260 | 25 | 124 |
| 4. | 2005-2006 | 39.373 | 1.940 | 64 | 19.829 | 24 | 37 | 15.048 | 94 | 176 |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

c) Angka Kelulusan

Angka kelulusan pada semua tingkat pendidikan (SD/MI s.d. SMA/MA/SMK) pada umumnya cukup baik. Angka kelulusan pada tingkat SD/MI selama 3 (tiga) tahun menunjukkan rerata nilai diatas 99%. Sedang pada tingkat SMP/MI selama 3 (tiga) tahun rerata nilai diatas 97%. Tingkat SMA/MA/SMK angka kelulusan selama 3 (tiga) tahun berada diatas 95%. Angka kelulusan terendah, khususnya tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2005, yakni sebesar 97,84% untuk tingkat SMP/MTs dan 95,63% untuk tingkat SMA/MA/SMK. Terjadinya penurunan angka kelulusan ini perlu mendapat perhatian mengingat angka kelulusan bersifat paralel dengan kualitas/mutu pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.16
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun Ajaran | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
|----|--------------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| | | Peserta UAS | Lulus UAS | % | Peserta UAN | Lulus UAN | % | Peserta UAN | Lulus UAN | % |
| 1. | 2002-2003 | 5.926 | 5.926 | 100 | 6.692 | 6.682 | 99,85 | 5.722 | 5.353 | 93,55 |
| 2. | 2003-2004 | 6.034 | 6.034 | 100 | 6.456 | 6.445 | 99,83 | 5.357 | 5.288 | 90,29 |
| 3. | 2004-2005 | 6.108 | 6.087 | 99,66 | 6.460 | 6.321 | 97,85 | 4.445 | 4.251 | 95,64 |
| 4. | 2005-2006 | 6.211 | 6.207 | 99,94 | 5.670 | 5.495 | 96,91 | 5.201 | 4.613 | 88,69 |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

d) Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah

Kondisi gedung sekolah, ruang kelas dan sarana prasarana sekolah lainnya dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Kondisi gedung, ruang kelas dan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data secara rinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Kondisi Sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Tahun | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA/ SMK |
|-------------------------|----------------------------------|-------|---------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2002/2003 | | | |
| | - Sekolah | 407 | 83 | 49 |
| | - Persentase Kondisi Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 21,98 | 89,35 | 88,19 |
| | b. Rusak Ringan | 45,87 | 8,65 | 9,17 |
| | c. Rusak Berat | 32,15 | 2,01 | 0,24 |
| | - Persentase Fasilitas sekolah : | | | |
| | a. R. Perpustakaan | 41,46 | 87,32 | 95,83 |
| | b. R. UKS | 79,79 | 78,87 | 79,17 |
| | c. Laboratorium | 00 | 102,82 | 208,33 |
| | d. R. Ketrampilan | 00 | 52,11 | 66,67 |
| e. Bengkel | 00 | 00,00 | 28,00 | |
| f. Ruang praktek | 00 | 00,00 | 20,00 | |
| g. Serbaguna | 00 | 18,22 | 12,50 | |
| h. Bimbingan penyuluhan | 00 | 64,32 | 91,67 | |
| 2. | 2003/2004 | | | |
| | - Sekolah | 399 | 83 | 51 |
| | - Persentase Kondisi Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 40,21 | 89,35 | 88,19 |
| | b. Rusak Ringan | 41,36 | 8,65 | 9,17 |
| | c. Rusak Berat | 18,43 | 2,01 | 0,24 |
| | - Persentase Fasilitas sekolah : | | | |
| | a. R. Perpustakaan | 41,46 | 87,32 | 95,83 |
| | b. R. UKS | 79,79 | 78,87 | 79,17 |
| | c. Laboratorium | 00 | 102,82 | 208,33 |
| | d. R. Ketrampilan | 00 | 52,11 | 66,67 |
| e. Bengkel | 00 | 00,00 | 28,00 | |
| f. Ruang praktek | 00 | 00,00 | 20,00 | |
| g. Serbaguna | 00 | 18,22 | 12,50 | |
| h. Bimbingan penyuluhan | 00 | 64,32 | 91,67 | |
| 3. | 2004/2005 | | | |
| | - Sekolah | 399 | 82 | 54 |
| | - Persentase Kondisi Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 40,21 | 65,96 | 83,36 |
| | b. Rusak Ringan | 41,35 | 32,03 | 13,89 |
| | c. Rusak Berat | 18,50 | 2,01 | 2,75 |
| | - Persentase Fasilitas sekolah : | | | |
| | a. R. Perpustakaan | 41,46 | 52,70 | 97,74 |
| | b. R. UKS | 79,79 | 48,47 | 94,74 |
| | c. Laboratorium | 00 | 77,11 | 157,89 |
| | d. R. Ketrampilan | 00 | 62,65 | 68,42 |
| e. Bengkel | 00 | 00 | 35,18 | |
| f. Ruang praktek | 00 | 3,61 | 40,74 | |
| g. Serbaguna | 00 | 22,89 | 15,79 | |
| h. Bimbingan penyuluhan | 00 | 73,49 | 84,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 4. | 2005/2006 | | | |
| | - Sekolah | 396 | 83 | 54 |
| | - Persentase Kondisi Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 48,83 | 90,50 | 85,2 |
| | b. Rusak Ringan | 31,92 | 6,67 | 9,59 |
| | c. Rusak Berat | 19,25 | 2,84 | 5,21 |
| | - Persentase Fasilitas sekolah : | | | |
| | a. R. Perpustakaan | 42,35 | 83,92 | 95,84 |
| | b. R. UKS | 74,55 | 78,99 | 99,59 |
| | c. Laboratorium | 00 | 102,94 | 107,92 |
| | d. R. Ketrampilan | 00 | | 54,17 |
| | e. Bengkel | 00 | | |
| | f. Ruang praktek | 00 | | |
| | g. Serbaguna | 00 | | |
| | h. Bimbingan penyuluhan | 00 | | |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

e) Kondisi Kelayakan mengajar guru/Relevansi Guru

Guru memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga kondisi kelayakan guru dan relevansinya dengan mata pelajaran yang dipegang sangat penting. Kelayakan mengajar guru dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan latar belakang pendidikannya.

Tabel 2.18
Kondisi Kelayakan Mengajar Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK dan MA di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun 2005/2006 | Guru | Layak mengajar (%) | Tidak sesuai mengajar (%) |
|----|-----------------|-------|--------------------|---------------------------|
| 1. | SD/MI | 3.505 | 3,095 (97,97 %) | 45 (2,03%) |
| 2. | SMP/MTs | 1.969 | 1,573 (88,93 %) | 269 (11,07 %) |
| 3. | SMA | 572 | 554 (94,58 %) | 22 (5,42 %) |
| 4. | SMK | 1.778 | 854 (89,88 %) | 109 (10,02 %) |
| 5. | MA | 147 | 146 (94,66 %) | 7 (5,44 %) |

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

B. Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah (PLS) bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal dan putus sekolah untuk dapat mengembangkan diri, sikap, pengetahuan,

keterampilan, potensi pribadi dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan luar sekolah diarahkan untuk memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan keluarga. Disamping itu untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat diperlukan perpustakaan yang memadai.

Sasaran program PLS adalah (a) penduduk yang masih buta aksara latin, angka, dan bahasa Indonesia; (b) warga belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan (c) pemberdayaan tempat/sanggar pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat.

Adapun informasi tentang Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Siswa putus sekolah
 - SD/MI : 638 orang
 - SMP/MTs : 782 orang
 - SMA/K/MA : 843 orang
2. Tamat tidak melanjutkan
 - SD/MI : 380 orang
 - SMP/MTs : 9.782 orang
 - SMA/K/MA : 2.843 orang
3. Penduduk yang buta huruf
 - Usia 10 – 44 tahun : 3.201 orang
 - Usia 45 tahun ke atas : 600 orang
4. Kelompok Belajar
 - Kejar Paket A Setara SD : 12 kelompok, 120 WB
 - Kejar Paket Aksara Fungsional : 27 kelompok, 270 WB
 - Kejar Paket B Setara SMP : 181 kelompok, 3.620 WB
 - Kejar Paket C : 9 kelompok, 270 WB
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 34 kelompok, 5.200 anak
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
 - Jumlah Kelompok : 50 kelompok
 - Bidang Usaha :
 - Usaha emping mlinjo : 8 kelompok, 40 orang
 - Usaha batakoko : 3 kelompok, 15 orang
 - Usaha anyaman bambu : 15 kelompok, 80 orang
 - Usaha makanan kecil : 24 kelompok, 125 orang
6. Lembaga Kursus
 - Jumlah Lembaga Kursus : 11 lembaga
 - Jenis Kegiatan :
 - Kursus Komputer : 275 orang
 - Kursus Akuntansi : 342 orang

- Kursus Bahasa Inggris : 256 orang
 - Kursus Menjahit : 179 orang
7. Tutor
- Tutor Paket A Fungsional: 25 orang
 - Tutor Paket A Setara SD : 24 orang
 - Tutor Paket B : 36 orang
 - Tutor Paket C : 48 orang
8. Perpustakaan
- Perpustakaan Umum Kabupaten 1 unit dengan jumlah koleksi 19.372 buku, 11.462 judul buku dan jumlah anggota 15.051 orang; terdiri dari anggota perpustakaan umum 10.765 orang dan anggota perpustakaan keliling 4.286 orang, perpustakaan kecamatan 12 unit (4.958 buku dan 4.958 judul buku) dan Perpustakaan desa 10 unit (1.060 buku dan 353 judul buku). Sementara itu Perpustakaan keliling meliputi propinsi 1 unit dengan frekuensi pelayanan 3 kali per minggu dan kabupaten 2 unit dengan koleksi buku 3.523 buku. Pelayanan Perpustakaan keliling kabupaten masing-masing 5 kali per minggu dengan jangkauan pelayanan keliling meliputi 10 kecamatan (kecuali Kecamatan Wates dan Pengasih). Jumlah pengunjung perpustakaan umum 37.294 orang dan pengunjung perpustakaan keliling sebanyak 17.370 orang serta jumlah peminjam sampai dengan Oktober 2006 sebanyak 24.528 orang dengan rata-rata pengunjung per hari sekitar 100 orang.

C. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo kental dengan nuansa budaya Jawa, baik yang berkaitan dengan benda-benda bersejarah, upacara adat, dan berbagai karya seni lainnya. Potensi seni budaya tersebut merupakan hasil dari olah cipta, rasa, dan karsa serta kristalisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan dijunjung tinggi sebagai sebuah wahana penegakkan norma-norma kehidupan yang luhur. Seni dan budaya juga merupakan sebuah identitas bagi suatu komunitas ataupun daerah. Kemajuan seni dan budaya akan membawa pengaruh yang positif baik bagi upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya itu sendiri maupun bagi masyarakat pendukungnya, secara sosial, budaya, bahkan ekonomi.

Adapun perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Data Perkembangan Seni Budaya

| No | Jenis>Nama | Jumlah | | | |
|----|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Seni Tari | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | a. Tradisional | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | b. Kreasi Baru | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Seni Musik | 665 | 665 | 665 | 665 |
| | a. Diatonis | 104 | 104 | 104 | 104 |
| | b. Pentatonis | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 3 | Seni Rupa | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | a. Lukis | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | b. Pahat | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | Seni Teater | 112 | 112 | 112 | 112 |
| | a. Tradisional | 107 | 107 | 107 | 107 |
| | b. Modern | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Upacara Adat | 41 | 41 | 48 | 56 |
| 6 | Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Peninggalan Sejarah Purbakala | 168 | 168 | 175 | 175 |
| | a. Masa Prasejarah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. Masa Hindu-Budha | 141 | 141 | 148 | 148 |
| | c. Masa Islam | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | d. Kolonial/Perjuangan | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Permuseuman | - | 1 (embrio) | 1 (embrio) | 1 (embrio) |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan dan kesenian daerah, pemerintah telah mengikuti dan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain Festival Kesenian Yogyakarta, gelar seni budaya di Jakarta dalam rangka Adegung Negari Ngayogyakarta Hadiningrat, pentas seni di obyek wisata, festival sendratari, even di panggung kesenian dan di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta Nyadran Agung. Upaya yang dilakukan tersebut belum mampu menghasilkan seperti yang diharapkan.

2.3.4 Agama

Pembangunan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, pembangunan agama memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Agama mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar

berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Melalui pengalaman agama seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya, bersikap empati kepada sesama. Agama sebagai sistem nilai berfungsi sebagai penyelamatan, pendidikan, bimbingan, pemersatu, pengubah dan pemecahan yang diarahkan pada upaya pembentukan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin maju.

Pembangunan agama di Kabupaten Kulon Progo dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui berbagai media, serta mengoptimalkan fungsi dan peran keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk mewujudkan keluarga berkualitas/keluarga sakinah yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Disamping itu juga diarahkan untuk menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama yang kondusif serta menghindari perpecahan yang dapat merusak hubungan sosial umat beragama dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti dialog tokoh-tokoh agama, musyawarah antar umat beragama, temu karya pemuka agama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membina dan memperkuat kerukunan dan persatuan.

Lembaga pendidikan formal yang bercirikan keagamaan saat ini terdapat 26 Madrasah Ibtidaiyah (2 negeri dan 24 swasta), 12 Madrasah Tsanawiyah (6 negeri dan 6 swasta) dan 5 Madrasah Aliyah (3 negeri dan 2 swasta). Pada madrasah negeri fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar dan guru sudah memadai namun pada madrasah swasta masih mengalami kekurangan fasilitas dan guru.

Di Kabupaten Kulon Progo jumlah pemeluk agama dengan sarana ibadah, perkembangannya selama lima tahun terakhir pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah Pemeluk Masing-Masing Agama
di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Jenis Agama | | | | | Total |
|----|-------|-------------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | |
| 1 | 2000 | 413.265 | 5.987 | 20.631 | 10 | 816 | 440.709 |
| 2 | 2001 | 416.248 | 6.102 | 20.785 | 6 | 679 | 443.820 |
| 3 | 2002 | 419.995 | 7.499 | 20.708 | 11 | 672 | 448.885 |
| 4 | 2003 | 420.068 | 6.553 | 21.281 | 11 | 680 | 448.599 |
| 5 | 2004 | 423.665 | 6.885 | 21.586 | 7 | 669 | 452.607 |
| 6 | 2005 | 427.252 | 6.084 | 21.210 | 9 | 670 | 455.226 |

Sumber data : Kantor Dep. Agama Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.21
Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Masjid | Mushola | Langgar | Gereja Kristen | Rumah Kebaktian | Gereja Katolik | Kapel | Vihara | Cetya |
|----|-------|--------|---------|---------|----------------|-----------------|----------------|-------|--------|-------|
| 1 | 2000 | 886 | 315 | 659 | 26 | 18 | 4 | 49 | 1 | - |
| 2 | 2001 | 892 | 318 | 671 | 36 | 20 | 4 | 49 | 2 | - |
| 3 | 2002 | 919 | 330 | 660 | 26 | 18 | 4 | 49 | 2 | - |
| 4 | 2003 | 920 | 331 | 660 | 26 | 18 | 4 | 49 | 2 | - |
| 5 | 2004 | 923 | 329 | 660 | 24 | 15 | 13 | 35 | - | 2 |
| 6 | 2005 | 975 | 439 | 457 | 31 | 35 | 28 | 33 | 2 | - |

Sumber data : Kantor Dep. Agama Kabupaten Kulon Progo

2.3.5 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat secara harmonis, melembaga dan dinamis melalui penyuluhan/bimbingan, rehabilitasi dan penyantunan.

Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 22 jenis PMKS yang dapat dibagi dalam 8 kelompok yakni : anak, wanita, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat. Secara kuantitatif PMKS yang ada di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.22
Data PMKS yang menonjol di Kabupaten Kulon Progo

| No | Jenis PMKS | Th, 2001 | Th, 2003 | Th, 2004 | Satuan |
|----|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anak Terlantar | 2.978 | 3.494 | 3.846 | Anak |
| 2 | Anak Jalanan | 29 | 167 | 291 | Anak |
| 3 | Anak Cacat | -- | 1.019 | 961 | Anak |
| 4 | Tuna Susila | 36 | 10 | 15 | Orang |
| 5 | Pengemis | 55 | 42 | 29 | Orang |
| 6 | Gelandangan | 5 | 16 | 13 | Orang |
| 7 | Penyandang Cacat | 2.318 | 3.388 | 3.301 | Orang |
| 8 | Pasca Bekas Penyakit Kronis | 16 | 447 | 352 | Orang |
| 9 | Korban Penyalahgunaan Napza | 6 | 3 | 17 | Orang |
| 10 | Pemulung | 89 | 64 | 63 | Orang |
| 11 | Bekas Narapidana | 112 | 203 | 210 | Orang |
| 12 | Lanjut Usia Terlantar | 9.025 | 4.771 | 5.192 | Orang |
| 13 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 1.930 | 1.805 | 2.071 | Orang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--------|--------|--------|-------|
| 14 | Keluarga Fakir Miskin | 51.309 | 35.034 | 36.055 | K.K. |
| 15 | Keluarga Berumah Tak Layak Huni | 5.585 | 2.929 | 3.158 | K.K. |
| 16 | Keluarga Bermasalah Sosial dan Psikologi | 142 | 347 | 420 | K.K. |
| 17 | Keluarga Tempat Tinggal Daerah Rawan Bencana | 6.282 | 3.127 | 3.251 | K.K. |
| 18 | Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya | 922 | 245 | 538 | Orang |
| 19 | Korban Bencana Sosial | 6 | 25 | 32 | Orang |
| 20 | Korban Tindak Kekerasan | 15 | 35 | 108 | Orang |
| 21 | Anak Nakal | 34 | 35 | 176 | Orang |
| 22 | Pekerja Migran | 2 | 5 | 71 | Orang |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

Adapun mengenai jumlah keluarga fakir miskin per wilayah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tabel 2.23
Sebaran Kepala Keluarga Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Kulon Progo

| Wilayah | Kecamatan | Jumlah KK Fakir Miskin | | |
|------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | 2001 | 2003 | 2004 |
| Pegunungan | Samigaluh | 6.629 | 4.964 | 4.943 |
| | Kalibawang | 3.401 | 2.144 | 4.217 |
| | Girimulyo | 4.644 | 1.201 | 1.201 |
| | Nanggulan | 2.474 | 2.410 | 2.407 |
| | Kokap | 3.832 | 3.397 | 3.036 |
| | Jumlah | 20.980 | 14.116 | 15.804 |
| Urban | Wates | 3.973 | 2.443 | 2.592 |
| | Pengasih | 3.102 | 2.783 | 3.148 |
| | Sentolo | 6.692 | 5.314 | 5.314 |
| | Jumlah | 13.767 | 10.540 | 11.054 |
| Pantai | Galur | 3.699 | 1.026 | 983 |
| | Lendah | 5.002 | 2.754 | 2.752 |
| | Panjatan | 4.939 | 3.064 | 4.349 |
| | Temon | 2.922 | 3.534 | 3.113 |
| | Jumlah | 16.562 | 10.378 | 11.197 |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.24
Sebaran Lanjut Usia Terlantar di wilayah Kabupaten Kulon Progo

| Wilayah | Kecamatan | Jumlah Lanjut Usia Terlantar | | |
|------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2001 | 2003 | 2004 |
| Pegunungan | Samigaluh | 823 | 430 | 429 |
| | Kalibawang | 422 | 410 | 564 |
| | Girimulyo | 339 | 159 | 159 |
| | Nanggulan | 3.031 | 384 | 385 |
| | Kokap | 756 | 489 | 312 |
| | Jumlah | 5.371 | 1.872 | 1.849 |
| Urban | Wates | 987 | 754 | 746 |
| | Pengasih | 385 | 536 | 687 |
| | Sentolo | 682 | 329 | 329 |
| | Jumlah | 2.054 | 1.619 | 1.762 |
| Pantai | Galur | 265 | 210 | 208 |
| | Lendah | 488 | 382 | 367 |
| | Panjatan | 854 | 350 | 700 |
| | Temon | 293 | 338 | 307 |
| | Jumlah | 1.900 | 1.280 | 1.582 |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

Selain PMKS yang menonjol, Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber potensi kesejahteraan sosial yang cukup berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung datau memperkuat usaha Kesejahteraan Sosial. Adapun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kulon Progo tahun 2005

| No | Jenis PSKS | Jumlah |
|----|---|-----------------|
| 1 | Petugas Sosial Masyarakat (PSM) | 700 orang |
| 2 | Organisasi Sosial (Orsos) | 45 organisasi |
| 3 | Karang Taruna | 101 Kelompok |
| 4 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) | 9.300 orang |
| 5 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | 10.216 kelompok |
| 6 | Satgas PBA | 408 orang |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo

2.3.6 Pemberdayaan Perempuan

Perempuan sebagai mitra sejajar dengan pria dalam proses pembangunan harus lebih diberdayakan dengan tetap memperhatikan kodrat dan martabatnya. Untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan, maka perlu pemberdayaan

perempuan melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan di segala bidang untuk dilibatkan dalam proses pembangunan.

Dalam era otonomi daerah, sistem pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan yang berbasis pada masyarakat, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa program pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan harus ditekankan kepada pemenuhan dan partisipasi masyarakat termasuk kaum wanita. Realitanya peran wanita dalam pembangunan masih dikesampingkan dan belum proporsional, artinya masih terjadi disparitas gender yang sangat signifikan.

Jumlah penduduk perempuan di Kulon Progo pada tahun 2004 sebanyak 232.286 orang (51,14%). Ketimpangan gender terlihat antara lain dari peran sebagai peserta KB aktif, yaitu 95,32% (48.252 jiwa) peserta KB aktif adalah perempuan, dan pada penempatan tenaga kerja sebesar 67,62% (165 jiwa) adalah tenaga kerja wanita. Pada akses pendidikan, perbedaan yang cukup nyata antara laki-laki dan perempuan terdapat pada tingkat SLTA, yaitu 60,28% adalah siswa laki-laki dan 39,72% siswa perempuan, sementara pada tingkat perguruan tinggi, siswa perempuan (sebesar 51,59%), lebih banyak dibandingkan (laki-laki sebesar 48,41%). Dalam bidang politik dari 35 anggota legislatif, baru 3 orang perempuan yang menjadi anggota legislatif (8,5%).

2.3.7 Pemuda dan Olahraga

Untuk menghadapi masa depan yang penuh persaingan, pemuda perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya antara lain kepekaan dan wawasan yang luas, penguasaan ilmu dan teknologi, kualitas kepribadian dan moralitas yang tinggi. Disamping itu pemuda perlu menghindari penggunaan obat terlarang, minuman keras, napza, tindak kriminal, aksi vandalisme corat-coret grafiti dan perilaku hubungan seks bebas.

Peran organisasi kepemudaan dalam rangka ikut menanggulangi masalah pemuda tersebut diatas sangat dibutuhkan. Berbagai organisasi pemuda di Kabupaten Kulon Progo antara lain KNPI, Orsospol, Organisasi Mahasiswa, OSIS, Pramuka, Karang Taruna, organisasi kesenian, organisasi olah raga dan organisasi keagamaan.

Dalam rangka meningkatkan prestasi dalam bidang keolahragaan fasilitas dan sarana olah raga yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo terdapat 394 lapangan olah raga dan 244 tenaga pelatih, dengan rincian sebagai berikut Cabang Bola Voli: 176 lapangan/92 pelatih, Cabang Bulutangkis: 95 lapangan/21 pelatih, Cabang Sepak Bola: 19 lapangan/15 pelatih, Cabang tenis Meja: 88 lapangan/25 pelatih, Cabang Tenis Lapangan: 7 lapangan/5 pelatih, cabang Bola Basket: 5 lapangan/6 pelatih, Cabang Atletik: 2 lapangan/4 pelatih, dan Cabang Tinju: 2 sasana/2 pelatih, serta cabang olah raga dayung 2 pelatih.

2.3.8 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Transmigrasi

Jumlah penduduk Kulon Progo tahun 2005 berjumlah 455.944 orang, penduduk usia kerja/tenaga kerja 377.641 orang, angkatan kerja sebanyak 288.623, dengan rincian laki-laki sebanyak 140.944 orang dan perempuan sebanyak 147.646 orang; bekerja sebanyak 373.591 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 133.129 orang, dan perempuan sebanyak 139.462; pengangguran sebanyak 16.302 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 7.848 orang, perempuan sebanyak 8.184 orang. Jumlah pencari kerja tahun 2005 sebanyak 9.729 orang, terdiri dari 76 orang (0,78%) berpendidikan SD, 416 orang (4,28%) berpendidikan SLTP, 6.831 orang (70,21%) berpendidikan SLTA, 759 orang (7,80%) berpendidikan Diploma, dan 1.647 orang (16,93%) berpendidikan Sarjana. Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut berhasil ditempatkan/mendapat pekerjaan sejumlah 5.003 orang, yang terdiri dari antar kerja lokal (AKL) sebanyak 1.661 orang, antar kerja antar daerah (AKAD) sebanyak 1.752 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 1.590 orang, sedangkan secara kumulatif pekerja yang belum ditempatkan sebanyak 9.660 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.936 orang (61,45%) dan perempuan sebanyak 3724 orang (38,55%).

Keadaan tenaga kerja yang demikian perlu ditingkatkan keterampilan dan atau spesifikasinya dengan melalui pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Jumlah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 buah, lembaga pelatihan pemerintah sebanyak 3 buah; BLK, SKB, dan LBK serta 1 buah yayasan.

Kondisi perusahaan di Kabupaten Kulon Progo yang terdaftar tahun 2005 sebanyak 303 perusahaan, dirinci sebagai berikut : perusahaan dengan tenaga kerja lebih 100 orang sebanyak 7 perusahaan, jumlah tenaga kerja 50-99 orang sebanyak 7 perusahaan, jumlah tenaga kerja 25-49 orang sebanyak 23 perusahaan, jumlah tenaga kerja 10-24 orang sebanyak 55 perusahaan, jumlah tenaga kerja 1-9 orang sebanyak 211 perusahaan, jumlah jamsostek sebanyak 97 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.754 orang dan jumlah tenaga kerja keseluruhan di perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 6.163 orang terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebanyak 3.294 orang dan wanita sebanyak 2.869 orang. Jumlah perusahaan wajib membuat PP sebanyak 15 perusahaan dan KKB sebanyak 8 perusahaan. Sedangkan jumlah data perusahaan dan tenaga kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja

| Tahun | Jumlah Perusahaan | Tenaga Kerja | | |
|-------|-------------------|--------------|--------|--------|
| | | Laki-Laki | Wanita | Jumlah |
| 2002 | 248 | 2.948 | 1.304 | 4.252 |
| 2003 | 281 | 3.104 | 1.389 | 4.493 |
| 2004 | 298 | 3.146 | 2.854 | 6.000 |
| 2005 | 303 | 3.294 | 2.869 | 6.163 |

Sumber data: Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

Apabila kita lihat tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Tahun 2003 tercatat sebanyak 13.183 orang, tahun 2004 meningkat menjadi 14.538 orang, dan tahun 2005 meningkat lagi menjadi 16.032 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Penganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | % |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1 | SD Tidak Tamat | 552 | 656 | 1.208 | 7.5 |
| 2 | SD Tamat | 1.775 | 1.929 | 3.704 | 23.1 |
| 3 | SLTP | 2.301 | 2.361 | 4.662 | 29.1 |
| 4 | SLTA | 2.733 | 2.736 | 5.470 | 32.1 |
| 5 | Akademi | 204 | 212 | 417 | 2.6 |
| 6 | PT | 282 | 290 | 572 | 3.5 |
| | Jumlah | 7.848 | 8.184 | 16.032 | |

Sumber data : Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

B. Transmigrasi

Persebaran dan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu masalah pokok di bidang kependudukan. Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2004 secara keseluruhan penduduk berjumlah 451.166 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 769 jiwa per km², yang terkonsentrasi di wilayah urban seperti Wates, Lendah, Galur, Pengasih dan Sentolo. Dari jumlah penduduk ini 60% menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian dalam arti luas, dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang, rata-rata lahan kurang dari 0,25 Ha. Keterbatasan daya dukung ruang dan sumber daya produksi, kepadatan penduduk dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masih terdapatnya mayoritas komunitas petani dengan pemilikan lahan yang relatif sempit dan berada di

kawasan kritis, tandus dan rawan bencana alam serta dukungan mobilitas penduduk secara nasional memberikan landasan yang kuat bagi perencanaan mobilitas penduduk secara sistematis melalui Program Transmigrasi.

Makin terbatasnya lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria kelayakan Program. Saat ini makin terbatas pembangunan pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria kelayakan program 2C (*Clear* dan *Clean*) serta 4L (Layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan). Hal ini dapat ditunjukkan oleh menurunnya penempatan transmigrasi ke luar Jawa. Dalam tiga tahun terakhir penempatan transmigran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 penempatan transmigran mencapai 110 KK, tahun 2003 turun menjadi 74 KK, tahun 2004 mencapai 85 KK, dan tahun 2005 target sebanyak 45 KK terealisasi 100% yaitu 147 jiwa. Keterbatasan alokasi penempatan transmigran ke luar pulau Jawa ini mendorong untuk mengembangkan potensi domestik melalui program transmigrasi lokal. Pada tahun 2002 penempatan transmigran lokal mencapai 100 KK (kawasan pantai Desa Bugel Kecamatan Panjatan) dan tahun 2005 mencapai 150 KK (kawasan pantai desa Karangsewu Kecamatan Galur). Pengembangan transmigrasi lokal ini didasarkan untuk keperluan lahan relokasi korban bencana alam dan penduduk di kawasan rawan bencana alam. Agar unit pemukiman transmigrasi lokal (desa Bugel dan Karangsewu) bisa mandiri, masih diperlukan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dengan memberikan pembinaan dan bantuan yang sesuai dengan kondisi dan potensi alam.

Perkembangan pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun terakhir atas dasar target dan realisasinya per jenis Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Target dan Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi
di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Target (KK) | Realisasi | |
|----|-------|-------------|-----------|------|
| | | | KK | Jiwa |
| 1 | 2000 | 19 | 19 | 73 |
| 2 | 2001 | 70 | 68 | 223 |
| 3 | 2002 | 75 | 75 | 263 |
| 4 | 2003 | 75 | 74 | 268 |
| 5 | 2004 | 85 | 85 | 278 |
| 6 | 2005 | 45 | 45 | 147 |

Sumber data : Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

2.4 PRASARANA DAN SARANA DAERAH

2.4.1 Pertanian

Pembangunan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan serta perikanan kelautan. Pemenuhan hak dasar rakyat pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah untuk memenuhinya, demikian juga dalam pemenuhan pangan dalam jumlah cukup dan berkualitas yang merupakan salah satu dari hak dasar rakyat tersebut. Pembangunan pertanian harus diarahkan dalam rangka mengupayakan tetap terjaganya ketahanan pangan masyarakat sekaligus dapat mengembangkan usaha agribisnis di masyarakat baik di subsistem hulu (penyediaan agroinput), budidaya (*on farm*), hilir (pasca panen dan pengolahan) maupun jasa pendukungnya (permodalan, transportasi dan pasar).

Hasil pembangunan pertanian di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa hingga tahun 2004 ketahanan pangan selalu dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi padi pada tahun 2004 sebesar 103.210.760 kg GKG atau setara beras 67.047.990 kg. Dari Susenas tahun 2002 kebutuhan beras/kapita/tahun penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 83,091 kg, sehingga kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2004 yang berjumlah 452.812 jiwa adalah sebanyak 37.624.000 kg. Dengan demikian masih terjadi surplus beras sebanyak 29.423.840 kg atau sebesar 45.267.446 kg GKG. Jika dilihat dari kemampuan daya beli beras dapat diketahui bahwa dengan mengkonversikan seluruh produksi hasil pertanian (dalam arti luas) ke dalam pangan setara beras maka dicapai ketersediaan pangan setara beras di Kabupaten Kulon Progo tahun 2004 sebesar 312.398.650 kg. Dengan jumlah penduduk Kulon Progo tahun 2004 sebanyak 452.812 jiwa maka ketersediaan pangan setara beras adalah 689,91 kg/kapita/th. Mengacu pada kebutuhan rata-rata 83.091 kg/kapita/tahun maka total kebutuhan penduduk Kulon progo adalah 37.624.000 kg sehingga dapat disimpulkan terjadi surplus pangan setara beras sebesar 274.774.650 kg. Selain itu ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo juga dapat dilihat dari Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2004 yang mencapai 2.980 kalori/kapita/hari, kondisi ini telah melampaui target PPH Nasional yang sebesar 2.500 kalori/kapita/hari. Tabel berikut ini menunjukkan keadaan Produksi setara beras dan pola pangan harapan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2002-2005.

Tabel 2.29
Keadaan Produksi Setara Beras dan Pola Pangan Harapan
Kabupaten Kulon Progo

| No | Jenis/ Macam | Tahun | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Produksi Beras (kg) | 58.432.068,5 | 73.573.073,0 | 67.047.990,0 | 67.234.700,00 |
| 2. | Kebutuhan beras (kg) | 38.866.538,8 | 37.488.498,8 | 37.624.000,0 | 37.863.657,70 |
| 3. | Ketersediaan pangan setara beras (kg/kapita/tahun) | 662,08 | 666,2 | 689,9 | 687,09 |
| 4. | Surplus beras (kg) | 19.565.529,7 | 36.084.573,2 | 29.423.840,0 | 29.371.045,30 |
| 5. | Surplus pangan setara beras (kg) | 239.299.181,2 | 263.059.781,2 | 274.774.640,0 | 275.236.605,30 |
| 6. | Pola Pangan Harapan (kalori/kapita/hari) | 3.405,0 | 3.405,0 | 2.980,0 | 2.878,00 |
| | Jumlah Jiwa | 447.153 | 451.174 | 452.812 | 455.689 |
| | Kebutuhan beras/kapita/th | 86,92 | 83,091 | 83,091 | 83,091 |
| | PPH Nasional (kalori/kapita/hari) | 2.500 | 2.500 | 2500 | 2.500 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.30 menunjukkan perkembangan tingkat konsumsi protein hewani asal ternak yang secara total menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2002-2005.

Tabel 2.30
Data Realisasi Konsumsi Protein Hewani Asal dari Daging, Telur dan Susu

| No. | Jenis Konsumsi | Tahun (Gr/Kapita/Hari) | | | |
|-----|----------------|------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Daging | 3,379 | 3,584 | 3,413 | 4,074 |
| 2. | Susu | 1,196 | 1,315 | 1,533 | 1,702 |
| 3. | Telur | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,010 |
| | Jumlah | 4,590 | 4,915 | 4,962 | 5,786 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.31 menunjukkan tingkat konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 mencapai 8,63 kg/kapita/tahun meningkat dari tahun 2004 yang mencapai 7,17 kg/kapita/tahun, tahun 2003 yang mencapai 6,24 Kg/Kapita/Tahun dan tahun 2002 yang mencapai 5,70 Kg/Kapita/Tahun.

Tabel 2.31
Data Tingkat Konsumsi Makan Ikan Penduduk Kabupaten Kulon Progo

| No. | Uraian | Tahun (Kg/Kapita/Thn) | | | |
|-----|---------------------|-----------------------|------|------|------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Konsumsi makan ikan | 5,70 | 6,24 | 7,17 | 8,63 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Upaya memberdayakan petani dan nelayan yang tergabung dalam wadah kelembagaan kelompok tani melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan peningkatan kelas kelompok tani. Jumlah kelompok tani meningkat dari 812 kelompok pada tahun 2003 menjadi 827 kelompok pada tahun 2004 atau sebesar 1,8%. Sedangkan jumlah petani/buruh tani yang bergabung dalam kelompok tani meningkat sebanyak 1.652 orang atau meningkat 3,16% dari tahun 2003. Data perkembangan kelas kelompok tani, jumlah petani/buruh tani dan jumlah petani/buruh tani yang tergabung dalam kelompok tani pada tahun 2003-2005 dapat dilihat pada tabel 2.32.

Tabel 2.32
Data Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Kelas Kelompok Tani | Tahun | | | |
|-----|---------------------|-------|------|------|------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Pemula | 7 | 13 | 23 | 15 |
| 2. | Lanjut | 427 | 394 | 350 | 304 |
| 3. | Madya | 332 | 366 | 415 | 456 |
| 4. | Utama | 43 | 39 | 39 | 67 |
| | Jumlah | 809 | 812 | 827 | 842 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.33
Jumlah Petani/Buruh Tani dan Keanggotaan Kelompok Tani
di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Macam | Tahun (orang) | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Jumlah petani/buruh tani | 130.085 | 130.085 | 131.371 | 134.972 |
| 2. | Jumlah keanggotaan Kelompok tani | 52.152 | 52.152 | 53.804 | 54.119 |
| 3. | Rasio No.2 : No.1 | 40,09 % | 40,09 % | 40,96 % | 40,09 % |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui kegiatan vegetatif berupa penanaman Tanaman kayu-kayuan maupun kegiatan sipil teknis, yang dilaksanakan sebagai upaya memberdayakan petani dalam mengelola sumberdaya lahan dan air, memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan luas lahan kritis di Kabupaten Kulon Progo, tercatat pada tahun 2003 lahan kritis di Kabupaten Kulon progo seluas 7.987,2 ha menurun 293,4 ha (3,67%) atau menjadi 7.693,8 ha pada tahun 2004.

Data sebaran lahan kritis dan data sebaran hutan rakyat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2002, 2003, 2004 dan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Kecamatan | Tahun (Ha) | | | |
|-----|------------|------------|---------|-------|-------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Temon | 942 | 942 | 917 | 900 |
| 2. | Wates | 394 | 394 | 394 | 394 |
| 3. | Panjatan | 802 | 802 | 792 | 792 |
| 4. | Galur | 819 | 819 | 809 | 809 |
| 5. | Lendah | 259 | 259 | 249 | 249 |
| 6. | Sentolo | 793 | 743 | 688 | 661 |
| 7. | Pengasih | 677 | 526 | 502 | 462 |
| 8. | Kokap | 797 | 797 | 457 | 407 |
| 9. | Girimulyo | 1.230 | 1.230 | 216 | 196 |
| 10. | Nanggulan | 216 | 216 | 814 | 760 |
| 11. | Kalibawang | 1.338 | 988,4 | 945 | 915 |
| 12. | Samigaluh | 1.371 | 920,8 | 911 | 851 |
| | Jumlah | 9.638 | 8.637,2 | 7.694 | 7.396 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

Luas hutan dan lahan yang berfungsi hutan meningkat dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2002 meningkat menjadi 24,69%, tahun 2003 meningkat menjadi 25,68% dan tahun 2004 telah mencapai 27,9% dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.35
Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Kulon Progo

| No. | Kecamatan | Tahun (Ha) | | | |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Temon | 719,00 | 59,05 | 759,05 | 759,05 |
| 2. | Wates | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 183,00 |
| 3. | Panjatan | 651,00 | 51,00 | 651,00 | 651,00 |
| 4. | Galur | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 5. | Lendah | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 556,00 |
| 6. | Sentolo | 732,00 | 732,00 | 782,00 | 792,00 |
| 7. | Pengasih | 95,00 | 847,04 | 1.097,04 | 1.142,04 |
| 8. | Kokap | 3.125,00 | .350,00 | 3.650,00 | 3.785,00 |
| 9. | Nanggulan | 223,00 | 05,00 | 305,00 | 315,00 |
| 10. | Girimulyo | 2.066,00 | 2.146,75 | 2.496,75 | 2.591,85 |
| 11. | Samigaluh | 3.051,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 3.200,00 |
| 12. | Kalibawang | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.498,00 | 1.583,00 |
| | Jumlah | 13.422,00 | 14.001,84 | 15.301,84 | 15.832,94 |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo

2.4.2 Perindustrian dan Perdagangan

Kondisi kegiatan industri di Kabupaten Kulon Progo pada beberapa tahun terakhir secara umum mengalami perkembangan, walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan. Struktur industri yang ada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 sebanyak 20.152 unit usaha, terdiri dari kegiatan usaha industri rumah tangga dan industri kecil (99,98%) dan 0,02% industri menengah atau besar, sedangkan industri kecil yang berijin sebanyak 418 buah (2,8%).

Sebagai gambaran perkembangan sektor industri dalam 4 tahun dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan sektor industri Kabupaten Kulon Progo

| No | Uraian | Tahun | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Jumlah usaha (unit) | 19.896 | 20.018 | 20.065 | 20.148 |
| 2 | Tenaga kerja (orang) | 52.236 | 52.778 | 54.505 | 54.600 |
| 3 | Sentra industri (unit) | 79 | 81 | 83 | |
| 4 | Investasi (x Rp 000) | 41.335 | 44.063 | 47.412 | 47.530 |
| 5 | Nilai Produksi (x Rp 000) | 172.118 | 183.369 | 268.113 | 296.533 |
| 6 | Nilai Bahan Baku dan penolong (x Rp 000) | 87.722 | 94.252 | 140.644 | 154.790 |
| 7 | Nilai tambah (x Rp 000) | 84.397 | 89.117 | 127.469 | 141.743 |

Sumber data: Dinas Perindagkoptam Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka meningkatkan daya saing serta mutu produk, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai macam langkah dan upaya, meliputi kegiatan pelatihan, pembinaan mutu produk, promosi dan pameran serta bantuan permodalan. Adanya keterbatasan bahan baku, penguasaan teknologi dan manajemen diupayakan melalui kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Sarana perdagangan merupakan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan, di Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 terdapat 73 unit meliputi 35 pasar milik pemerintah kabupaten dan 38 pasar desa. Kondisi pasar tersebut adalah pasar milik kabupaten 4 unit dalam kondisi baik dan 31 unit dalam kondisi sedang, sedangkan pasar desa, 30 unit dengan kondisi sedang dan 8 unit dengan kondisi rusak. Dari 35 Pasar Negeri/milik pemerintah kabupaten terdapat 8 pasar yang aktifitasnya sangat mantap (mengarah harian), 23 aktifitasnya sedang, 4 pasar tidak ada aktifitas (mati). Dari 4 pasar mati tersebut 2 diantaranya sedang dalam rintisan untuk hidup kembali.

Selain itu, perkembangan perdagangan di Kabupaten Kulon Progo secara umum dapat dilihat dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Sampai dengan tahun 2005 penerbitan SIUP sebanyak 1.551 (terdiri dari SIUP-PB sebanyak 14, SIUP-PM sebanyak 32, SIUP-PK sebanyak 1.502), naik sebanyak 71 dari penerbitan tahun 2004 sebanyak 1.487 (terdiri dari SIUP-PB sebanyak 12, SIUP-PM sebanyak 25, SIUP-PK sebanyak 1.449). Disamping tersebut diatas, pertumbuhan sarana perdagangan berupa kios (di luar pasar) di pusat-pusat perekonomian sebanyak 516 kios dan toko swalayan sebanyak 9 toko. Penerbitan TDP sampai tahun 2004 sebanyak 2.078 unit (penutupan usaha sampai dengan tahun 2004 sebanyak 633 buah) naik 26 unit dari penerbitan sampai tahun 2003 sebanyak 2.052, sedangkan penerbitan TDG sampai tahun 2004 sebanyak 11 gudang.

Kemampuan pedagang dalam mengembangkan usahanya masih memerlukan fasilitas untuk meningkatkan kualitas produksi, permodalan, pemasaran dan pengelolaan administrasi.

Perlindungan terhadap konsumen masih terus diupayakan melalui kegiatan penyuluhan, pos ukur ulang dan pengawasan peredaran barang di pasar untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen.

Pengembangan ekspor daerah belum mengalami perkembangan/tetap di tahun 2004 dibanding tahun 2003, yaitu jumlah eksportir sebanyak 3 eksportir, jumlah komoditas 7 jenis, negara tujuan 14 negara, sedangkan nilai ekspor tahun 2004 sebesar 4.014.948 US dolar mengalami penurunan 749.696 US dolar dibanding tahun 2003 sebesar 4.764.644 US dolar. Untuk usaha penyediaan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kulon Progo terdapat 6 SPBU, 3 agen minyak tanah dengan 140 pangkalan minyak tanah.

2.4.3 Pertambangan dan Energi

Pertambangan di Kulon Progo sebagian besar merupakan kegiatan pertambangan rakyat, sebagian kecil lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha. Usaha pertambangan saat ini banyak dilakukan di sektor hulu yaitu penambangan atau penggalian. Kegiatan di sektor pengolahan melalui industri pertambangan yang dilakukan oleh dunia usaha masih terbatas pada penggilingan batu.

Dalam rangka mengatur usaha pertambangan pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut telah diterbitkan Ijin Pertambangan Daerah (IPD) pada tahun 2003 sebanyak 5 buah meliputi 2 buah IPD Pengolahan Pemurnian Andesit, 1 buah IPD Pengolahan Pemurnian Bentonite dan 2 buah IPD eksploitasi tanah urug. Sedangkan tahun 2004 diterbitkan IPD 10 buah meliputi 8 buah eksploitasi tanah urug, 1 buah perpanjangan IPD eksploitasi tanah urug dan 1 buah IPD Penyelidikan umum pasir laut. Selain IPD, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mengeluarkan ijin untuk pertambangan bahan galian vital dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP). Pada tahun 2003 telah dikeluarkan 3 buah ijin KP meliputi 2 buah KP Penyelidikan umum pasir besi dan 1 buah KP eksplorasi emas. Disamping itu pada tahun 2003 juga telah diterbitkan 1 buah ijin pengeboran air tanah.

Seiring dengan kebutuhan akan bahan galian, utamanya sebagai bahan bangunan, produksi bahan galian dari Kabupaten Kulon Progo juga mengalami fluktuasi. Peningkatan produksi terjadi pada batu andesit dan pasir. Produksi batu andesit meningkat dari 15.080 m³ pada tahun 2003 menjadi 25.869,5 m³ pada tahun 2004,

sedangkan pasir meningkat dari 2.340 m³ pada tahun 2003 menjadi 5.319 m³ di tahun 2004. Sementara batu kapur mengalami penurunan dari 11.531 m³ di tahun 2003 menjadi 7.951 m³ di tahun 2004 dan batu kerikil turun dari 12.024 m³ pada tahun 2003 menjadi 5.757 m³ di tahun 2004.

Tabel 2.37
Potensi Sumber Daya Mineral/Bahan Tambang/Galian
Di Kabupaten Kulon Progo

| No | Jenis | Lokasi | Jumlah Cadangan | Ket. |
|----|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Batubara | Kec. Girimulyo | 1.229.640 ton | Terindikasi |
| 2 | Pasir besi | Sepanjang pantai Selatan | 166.169.984 ton | Tereka |
| 3 | Emas | Kec. Kokap | Dalam urat-urat kwarsa | Terindikasi berupa "Vein" |
| 4 | Barit | Kec. Kokap | 22.500 m ³ | Terindikasi |
| 5 | Bentonite | Kec. Nanggulan | 260.858.851 ton | Terindikasi |
| 6 | Marmer | Kec. Samigaluh | 5.200.000 ton | Tereka |
| 7 | Tras | Kec. Kalibawang, Temon, Pengasih, dan Samigaluh | 230.194.300 ton | |
| 8 | Andesit | Kec. Samigaluh, Kokap | 6.902.618.256 ton | Tereka |
| 9 | Sirtu | Sungai Progo, Sudu, Tinalah, dan Serang | - | Tereka |
| 10 | Batu gamping | Kec. Samigaluh, Kalibawang, Sentolo, Pengasih, Lendah, dan Girimulyo | 2.451.045 ton | Tereka |
| 11 | Pasir kuarsa | Kec. Kokap | 2.306.311 ton | Tereka |
| 12 | Tanah liat/lempung | Kec. Kokap, Kalibawang, Nanggulan | 27.812.500 m ³ | Tereka |
| 13 | Batu mulia/setengah mulia | Kec. Samigaluh | 930.125 m ³ | Tereka |
| 14 | Mangan | Kec. Kokap dan Samigaluh | - | Terindikasi |

Sumber data : Dinas Perindagkoptam Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.38
Perkembangan perusahaan pertambangan umum

| No. | Jenis Ijin | Tahun | | |
|------|--------------------------------|-------|------|------|
| | | 2003 | 2004 | 2005 |
| I. | Kuasa Pertambangan (KP) | - | | |
| 1. | Penyelidikan Umum Pasir Besi | - | 1 | - |
| 2. | Penyelidikan Umum Mangan | 1 | - | 1 |
| 3. | Eksplorasi Emas | - | 1 | - |
| 4. | Eksplorasi Pasir Besi | - | - | 2 |
| 5. | Eksplorasi Mangan | - | 3 | - |
| II. | Ijin Pertambangan Daerah (IPD) | | | |
| 1. | Penyelidikan Umum Pasir Laut | - | - | 2 |
| 2. | Eksplorasi Tanah Urug | - | 9 | 13 |
| 3. | Pengolahan/ Pemurnian Bentonit | 1 | - | 1 |
| 4. | Pengolahan/ Pemurnian Andesit | 2 | - | 2 |
| III. | Ijin Pengeboran airtanah | | 1 | |

Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

Sumber energi yang paling banyak digunakan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kulon Progo adalah sumber energi konvensional seperti, kayu bakar/arang, minyak tanah, solar, bensin, LPG serta energi listrik, yang penggunaannya paling besar untuk rumah tangga. Pelayanan kelistrikan hampir seluruhnya bersumber dari PLN dan sebagian kecil yang tidak bersumber dari PLN seperti unit-unit PLTS yang dimanfaatkan di wilayah yang tidak terjangkau layanan PLN.

Data kelistrikan yang dilayani PLN adalah sebagai berikut: pemanfaatan sumber energi listrik sudah menjangkau seluruh desa, namun demikian terdapat 2,4% (14 dusun) belum berlistrik dan masih banyak penerangan jalan yang belum terpenuhi. Jumlah pelanggan meningkat dari 69.845 pada tahun 2003 menjadi 73.246 pelanggan pada tahun 2004, daya tersambung meningkat dari 44.490.960 VA di tahun 2003 menjadi 49.579.660 VA di tahun 2004. Dalam periode 2001-2004 jumlah pelanggan meningkat rata-rata 5,9% pertahun, VA tersambung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,6% pertahun. Pada tahun 2003 terpasang 10 unit listrik tenaga surya (PLTS), tahun 2004 sebanyak 15 unit, dan tahun 2005 sebanyak 15 unit.

Pengembangan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, gelombang air laut dan biogas dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih besar.

2.4.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk di dalamnya usaha mikro atau sering disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan faktor ekonomi mayoritas dalam arti sebagian besar pelaku usaha di Kulon PRogo termasuk dalam kategory ini. Oleh karena itu diperlukan upaya yang intensif dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk mendukung keberpihakan pada ekonomi rakyat demi terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh, mandiri, dan berkualitas agar memiliki kemampuan pemcahan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Keberadaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari segi kuantitas, maupun dari segi kualitas masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakibat pada lemahnya akses dan pangsa pasar, lemahnya permodalan, lemahnya organisasi dan manajemen, lemahnya teknologi, lemahnya kemitraan dan lemahnya jaringan usaha.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, berbagai kegiatan telah, sedang, dan akan dilakukan baik melalui temu usaha, pelatihan, pameran, magang, dan bentuk-bentuk kegiatan yang lain. Sedangkan lemahnya permodalan saat ini diatasi dengan disalurkan berbagai skim kredit, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD, penyisihan laba BUMN, subsidi BBM, maupun melalui Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang ada, termasuk LKM Binangun.

Secara umum gambaran keadaan UKM dan koperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Keadaan UKM di Kabupaten Kulon Progo

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | |
|----|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Perdagangan | Unit | 801 | 858 | 908 | 949 |
| 2 | Industri Kecil | Unit | | | | |
| | Pertanian | | 830 | 884 | 925 | 982 |
| | Non Pertanian | | 173 | 190 | 208 | 218 |
| 3 | Jasa | Unit | 189 | 191 | 209 | 214 |
| | Jumlah | | 1.993 | 2.123 | 2.250 | 2.363 |

Tabel 2.40
Keadaan koperasi di Kabupaten Kulon Progo

| No | Uraian | Satuan | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah | Unit | 213 | 218 | 226 | 246 |
| | KUD | Unit | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Non KUD | Unit | 201 | 206 | 214 | 234 |
| 2 | Anggota | Orang | 82.048 | 82.743 | 79.015 | 81.411 |
| | KUD | Orang | 52.190 | 52.190 | 48.685 | 49.940 |
| | Non KUD | Orang | 29.858 | 30.553 | 30.330 | 31.471 |
| 3 | Simpanan | Rp.000 | 17.164.472 | 18.195.204 | 12.384.430 | 12.406.935 |
| | KUD | Rp.000 | 2.127.539 | 8.780.196 | 6.171.816 | 7.116.327 |
| | Non KUD | Rp.000 | 15.036.933 | 9.415.008 | 6.212.614 | 5.290.608 |
| 4 | Modal sendiri | Rp.000 | 25.365.993 | 26.588.866 | 28.130.141 | 33.178.867 |
| | KUD | Rp.000 | 13.231.083 | 13.309.032 | 13.396.916 | 15.578.831 |
| | Non KUD | Rp.000 | 12.134.910 | 13.279.834 | 14.733.225 | 17.600.036 |
| 5 | Modal Luar | Rp.000 | 12.944.110 | 22.193.185 | 13.488.188 | 16.286.800 |
| | KUD | Rp.000 | 5.605.404 | 9.663.884 | 7.192.356 | 6.548.295 |
| | Non KUD | Rp.000 | 7.338.706 | 12.529.301 | 6.295.832 | 9.738.505 |
| 6 | Volume Usaha | Rp.000 | 43.679.210 | 44.181.782 | 36.218.168 | 39.008.123 |
| | KUD | Rp.000 | 19.698.991 | 19.754.059 | 11.740.327 | 12.345.600 |
| | Non KUD | Rp.000 | 23.980.219 | 24.427.723 | 24.477.841 | 26.662.523 |
| 7 | SHU | Rp.000 | 2.088.390 | 2.181.532 | 2.014.400 | 2.050.675 |
| | KUD | Rp.000 | 196.734 | 106.348 | 54.373 | 149.034 |
| | Non KUD | Rp.000 | 1.891.656 | 2.075.184 | 1.960.027 | 1.901.641 |
| 8 | Asset | Rp.000 | 48.383.353 | 50.541.885 | 25.636.729 | 51.516.342 |
| | KUD | Rp.000 | 22.440.681 | 23.079.264 | 2.643.645 | 22.275.160 |
| | Non KUD | Rp.000 | 25.942.672 | 27.462.621 | 22.993.084 | 29.241.182 |

Sumber data : Dinas Perindagkoptam Kabupaten Kulon Progo

2.4.5 Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal

Secara umum kondisi perkembangan usaha daerah di Kabupaten Kulon Progo belum dapat memberikan hasil optimal. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca keuangan dan perhitungan rugi/laba serta nilai kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Kulon Progo yaitu BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Wates, PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Pasar, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Perseroda "Selo Adi Karto" yang bergerak di bidang Produksi dan Perdagangan Hasil AMP (Asphalt Mixing Plant) serta Perumda "Aneka Usaha" yang meliputi Perbengkelan, Pemandian Clereng dan SPBU. Unit usaha di Perumda yang sudah berjalan adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum). Di samping itu terdapat pula BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) yang ada di setiap

kecamatan serta beberapa UPTD yaitu RSUD Wates, Balai Perbenihan dan Pembibitan, Posyankeswan (Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan), BIPP (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian), Balai Kebersihan, Balai Laboratorium dan Peralatan, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan BLK (Balai Latihan Kerja).

Secara umum, Kabupaten Kulon Progo cukup banyak memiliki potensi yang dapat ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri untuk mengolah, mengembangkan dan memasarkan, baik di bidang pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan, perhubungan maupun bidang kesehatan dan pendidikan. Namun suatu kenyataan menunjukkan bahwa daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah tujuan investasi dan diuntungkan baik dari segi geografis, sumber daya alam maupun kelengkapan infrastrukturnya akan semakin maju, sementara yang selama ini tertinggal akan kurang diminati oleh investor. Untuk itulah diperlukan adanya kebijakan yang mengatur penanaman modal upaya menarik investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri/asing.

Pada saat ini di Kabupaten Kulon Progo terdapat PMDN dengan kondisi satu perusahaan berjalan baik (PT Aneka Sinendo), satu perusahaan kurang baik (PT Pagilaran), dan satu perusahaan lagi sudah bangkrut (PT Tuwuh Agung). Sedangkan PMA (Korea) sedang dalam proses realisasi yaitu PT Sung Chang Indonesia, yang bergerak di bidang produksi rambut palsu. Untuk penanaman modal non fasilitas terdapat 20.065 unit perusahaan yang menyerap tenaga kerja 54.505 orang dan nilai investasi 47,411 milyar rupiah.

Sebagai gambaran perkembangan investasi PMA, PMDN, dan non Fasilitas di Kulon Progo secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.41
Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kulon Progo

| Tahun | PMA | | | PMDN | | |
|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Perusahaan (unit) | Jumlah Tenaga Kerja (orang) | Nilai Investasi (Milyar Rp) | Jumlah Perusahaan (unit) | Jumlah Tenaga Kerja (orang) | Nilai Investasi (Milyar Rp) |
| 2002 | - | - | - | 3 | 1.375 | 29.303 |
| 2003 | - | - | - | 3 | 1.509 | 30.845 |
| 2004 | - | - | - | 3 | 1.671 | 32.469 |
| 2005 | - | - | - | 2 | 11 | 8.263 |

Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.42
Realisasi Investasi non Fasilitas Kabupaten Kulon Progo

| Tahun | Jumlah Perusahaan (unit) | Jumlah Tenaga Kerja (orang) | Nilai Investasi (Milyar Rp) |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2002 | 19.896 | 52.236 | 41.334 |
| 2003 | 20.018 | 52.778 | 44.062 |
| 2004 | 20.065 | 54.505 | 47.411 |
| 2005 | 20.148 | 54.660 | 47.529 |

Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

2.4.6 Perhubungan, Transportasi, Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi

A. Perhubungan dan Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar memanfaatkan jalan raya sebagai jalur utama pergerakan lalu lintas, baik untuk pergerakan lokal maupun regional yang menghubungkan kota-kota besar seperti Yogyakarta, Purworejo, Magelang, Bantul, sedang sistem angkutan umum yang melayani terbagi atas pelayanan regional (Antar Kota Antar Propinsi/ AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta lokal (perdesaan).

Disamping jaringan jalan raya juga terdapat jalan Kereta Api (KA) sepanjang 26 km yang merupakan bagian dari jaringan jalan KA di Pulau Jawa lintas selatan. Jaringan jalan KA ini membelah kota Wates sehingga mempengaruhi perkembangan kota Wates, dan dengan akan beroperasinya rel ganda akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Adanya Kebijakan Nasional tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Lintas Selatan mengenai jaringan transportasi jalan khususnya jalur jalan selatan-selatan, dari Banten – Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Kulon Progo – Bantul – Wonosari – Wonogiri – Pacitan – Banyuwangi juga akan mempengaruhi perkembangan jaringan transportasi, arus transportasi dan perekonomian di Kulon Progo khususnya Kulon Progo bagian selatan.

Adapun sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.43
Sarana Transportasi di Kabupaten Kulon Progo

| No | Jenis Angkutan | Tahun (unit) | | | | |
|----|----------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Perdesaan | 205 | 208 | 212 | 237 | |
| 2 | AKDP | 78 | 81 | 81 | 81 | |
| 3 | AKAP | 61 | 60 | 83 | 84 | |

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Kulon Progo seluruhnya sepanjang 1.112.373 Km dengan perincian dari status dan kewenangan terdiri dari Jalan Nasional dengan panjang jalan 28,570 Km, Jalan Propinsi dengan panjang jalan 159,900 Km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan 923,903 Km

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo sebagian besar merupakan perbukitan sehingga geometris jalan daerah tersebut berupa tanjakan dan turunan tajam serta tikungan tajam, disertai dengan kondisi tanah yang labil dan mudah longsor.

Mengingat perkembangan transportasi yang akan datang dan kondisi geografis yang ada, maka demi kenyamanan pengguna jalan diperlukan prasarana jalan dan fasilitas kelengkapan pendukung jalan yang memadai. Pada saat ini prasarana jalan dan fasilitas kelengkapan pendukung jalan tersebut dalam kondisi sangat minim. Adapun data prasarana jalan dan fasilitas kelengkapan pendukung jalan yang ada sebagai berikut :

- Terminal
 - Terminal type C : 1 buah
 - Sub Terminal : 6 buah
 - Uji coba Sub Terminal Sentolo 1 buah
- Rambu-rambu yang meliputi rambu peringatan, larangan, petunjuk, Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) 971 buah
- Pagar pengaman 3.257, sebagian besar ada di jalan propinsi
- Marka jalan 900 m², titik rawan kecelakaan ada 7.
- Halte 4 buah
- Lampu traffic light 10 buah
- Lampu kedip (Warning Light) 20 buah

Sedangkan angkutan Kereta Api yang lewat Stasiun Wates dan Sentolo meliputi angkutan penumpang, angkutan barang, dan pendapatan dari barang, perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.44
Jumlah Angkutan Penumpang, Barang dan Pendapatan dari Angkutan Barang

| No | Jenis | Tahun | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Penumpang (orang) | 99.663 | 118.790 | 90.742 | 74.604 | 59.412 | 60.299 |
| 2 | Barang (kg) | 10.869 | 15.580 | 5.175 | 12.410 | 4.140 | 4.600 |
| 3 | Pendapatan angkutan barang (Rp) | 2.084.952 | 2.485.089 | 1.898.324 | 1.560.717 | 1.536.900 | 1.427.000 |

Sumber data : PT KAI Cab. Stasiun Wates dan Sentolo

B. Telekomunikasi

Jaringan sarana komunikasi lewat sambungan telepon telah dapat menjangkau sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah sambungan dapat dirinci perkembangannya sebagai berikut:

Tabel 2.45
Banyak Sambungan Telepon dirinci menurut Jenis Pelanggan

| No | Tahun | Jenis | | | | Total |
|----|-------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | Perorangan/ Perusahaan | Instansi Pemerintah/ Swasta | Dinas Telkom | Telepon Umum | |
| 1 | 2000 | 1.867 | 223 | 22 | 0 | 2.112 |
| 2 | 2001 | 1.717 | 275 | 19 | 132 | 2.143 |
| 3 | 2002 | 2.136 | 319 | 30 | 158 | 2.643 |
| 4 | 2003 | 2.143 | 341 | 30 | 180 | 2.694 |
| 5 | 2004 | 2.204 | 344 | 40 | 182 | 2.770 |
| 6 | 2005 | 2.984 | 388 | 5 | 182 | 3.559 |

Sumber data : PT Telkom Cab. Wates

Pelayanan komunikasi/informasi lewat surat pos yang dikelola lewat PT Pos Indonesia Cab. Wates di Kabupaten Kulon Progo terdapat 12 unit Layanan Pos dan Giro yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Banyaknya surat Pos yang dikirim dan diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46
Banyak surat pos yang dikirim dari Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Jenis Surat | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------------|---------|-----------------|----------|-----------|-------|
| | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Kilat | Kilat Khusus | Tercatat | Pos Paket | Wesel |
| 1 | 2000 | 430.423 | 14.942 | 316.410 | 75.023 | 10.808 | 2.360 | 8.249 |
| 2 | 2001 | 514.327 | 14.325 | 318.575 | 96.025 | 1.849 | 2.213 | 9.486 |
| 3 | 2002 | 86.325 | 64.936 | 9.188 | 107.146 | 1.167 | 1.567 | 3.787 |
| 4 | 2003 | 108.770 | 23.190 | 54.489 | 77.989 | 411 | 2.014 | 3.157 |
| 5 | 2004 | 122.448 | 11.468 | 65.816 | 42.145 | 787 | 3.132 | 3.850 |
| 6 | 2005 | 82.680 | 7.872 | 30.372 | 37.008 | 996 | 3.120 | 2.796 |

Sumber data : PT Pos dan Giro Cab. Wates

Tabel 2.47
Banyak surat pos yang diterima di Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun | Jenis Surat | | | | | | |
|----|-------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Kilat | Kilat Khusus | Tercatat | Pos Paket | Wesel |
| 1 | 2000 | 304.830 | 18.363 | 225.238 | 167.522 | 17.472 | 4.844 | 46.309 |
| 2 | 2001 | 338.665 | 15.144 | 223.180 | 172.340 | 1.421 | 2.850 | 40.632 |
| 3 | 2002 | 86.325 | 61.936 | 9.188 | 107.146 | 3.115 | 1.167 | 1.567 |
| 4 | 2003 | 169.204 | 27.792 | 98.461 | 117.741 | 510 | 5.570 | 36.842 |
| 5 | 2004 | 161.738 | 29.553 | 51.562 | 51.159 | 2.954 | 8.049 | 28.751 |
| 6 | 2005 | 73.644 | 15.036 | 43.488 | 40.992 | 1.210 | 2.112 | 21.624 |

Sumber data : PT Pos dan Giro Cab. Wates

C. Informasi dan Komunikasi

Sampai saat ini di Kabupaten Kulon Progo telah berkembang berbagai media informasi cetak antara lain Majalah Binangun (publikasi Pemerintah Kabupaten), Prestise (publikasi Dinas Pendidikan), Gelora Legislatif (publikasi DPRD), surat kabar harian berskala nasional dan daerah. Juga berkembang media elektronik seperti radio (Rosala, Andalan Muda, Galuh Citra Menoreh, Reksa Bhuana) dan media informasi yang menggunakan teknologi informasi seperti intranet (<http://Kulonprogo.net>) dan internet (warung internet Bina, situs Pemerintah Kabupaten <http://www.kulonprogo.go.id>, situs SMK Negeri I Pengasih).

Untuk meningkatkan arus informasi melalui media massa, maka telah dilakukan hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan insan pers, semakin meningkatnya pelayanan kepada pers/wartawan. Untuk meningkatkan promosi produk khas daerah Kulon Progo diselenggarakan melalui Pameran Manunggal Fair setiap tahun dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo yang perkembangannya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Peserta, Pengunjung, dan Transaksi di Pameran Manunggal Fair

| No. | Tahun | Jumlah Stand | Pengunjung | Uang Beredar (x Rp 000) | Transaksi Pesanan | |
|-----|-------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|------|
| | | | | | Nilai (x Rp 000) | Unit |
| 1 | 2002 | 109 | 267.600 | 415.000 | 173.730 | 503 |
| 2 | 2003 | 147 | 335.200 | 421.788,45 | 154.542 | 455 |
| 3 | 2004 | 141 | 400.000 | 632.372,65 | 193.777,75 | 830 |
| 4 | 2005 | 127 | 410.000 | 647.155 | 195.965,65 | 987 |

Sumber data: Kantor Humas Kabupaten Kulon Progo

2.4.7 Pariwisata

Kabupaten Kulon Progo memiliki beraneka ragam obyek dan daya tarik wisata yang meliputi pantai, pegunungan, goa, waduk, dan pemandian. Pengembangan pariwisata sudah dilakukan dan diarahkan pada peningkatan daya tarik serta promosi potensi pariwisata secara lokal, regional maupun nasional.

Sampai saat ini penataan dan pengelolaan obyek wisata relatif sudah berhasil menyediakan fasilitas dasar dan tumbuhnya fasilitas pendukung, terutama di obyek wisata Pantai Glagah, Trisik, dan Sermo, sehingga obyek wisata tersebut sudah relatif menjadi obyek wisata yang banyak diminati oleh wisatawan.

Tantangan pembangunan pariwisata Kabupaten Kulon Progo masih cukup besar terutama dalam upaya meningkatkan daya tarik di sejumlah obyek wisata. Minimnya daya tarik pariwisata disebabkan kurangnya prasarana pendukung, antara lain aksesibilitas, jaringan listrik, air bersih, dan belum adanya fasilitas daya tarik wisata rekreatif yang representatif, serta aspek lain yang mendukung, seperti penghijauan terutama di obyek wisata pantai. Permasalahan lain yang dihadapi kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo adalah belum optimalnya pertumbuhan usaha pariwisata, seperti usaha rekreasi dan hiburan umum, rumah makan, penginapan, souvenir, biro perjalanan wisata, dll. Disamping itu adanya kecenderungan pasar wisata minat khusus (*special interest*) Desa Wisata belum ditangkap sebagai peluang dan aturan yg berkaitan dengan penataan kawasan.

Promosi pariwisata yang dilakukan belum menunjukkan korelasi dengan peningkatan kunjungan wisata, bahkan dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pengunjung/wisatawan di Kabupaten Kulon Progo.

Data potensi wisata dan perkembangan jumlah pengunjung serta pendapatan Retribusi obyek wisata selama 4 (empat) tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.49
 Jenis dan Nama Obyek Wisata Di Kabupaten Kulon Progo

| No | Jenis | Nama Obyek Wisata | Tema Pokok Pengembangan |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | Pantai | a. Pantai Glagah b. Pantai Trisik c. Pantai Congot d. Pantai Bugel | Alam Pantai, Olah Raga, Agrowisata, Perkemahan Alam Pantai, Agrowisata, Belanja Ikan, Ritual Alam Pantai, Perikanan Tambak Alam Pantai, Agrowisata Sayuran |
| 2. | Goa | a. Goa Kiskendo dan Sumitro b. Goa Sriti c. Goa Lanang- Wedok | Penelusuran Goa/ <i>Caving</i> , Perkemahan Alam Goa dan Sejarah <i>Caving</i> /Petualangan Telusur Goa |
| 3. | Tirta | a. Waduk Sermo b. Clereng c. Ancol d. Bantar | Mancing, Restoran Apung, Keramba Ikan Pemandian Alam, Kolam Renang <i>Rafting</i> /Arung Jeram Olah Raga Turun Tambang, <i>Heritage</i> Jembatan Lama, Wisata Sejarah |
| 4. | Pegunungan | a. Puncak Suroloyo b. Gunung Linggo – Bantar | Alam Pegunungan , Perkebunan teh, Ritual 1 Suro Alam Pegunungan, Treking, Wisata Pedesaan |
| 5. | Religius/ Ziarah | a. Makam Girigondo b. Goa Maria Sendangsono, Kalibawang | Makam Keluarga Puro Pakualaman Ziarah bagi umat Katolik |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.50
Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Di Kabupaten Kulon Progo

| No | Nama Usaha | Jumlah (Tahun 2005) | Keterangan |
|----|--|------------------------|---|
| 1 | Pemandian Alam | 1 | Sebagian besar belum melengkap ijin usaha |
| 2 | Kolam Pemancingan | 3 | |
| 3 | Taman Rekreasi/Rekreasi Keliling | 1 | |
| 4 | Gelanggang Renang | 2 | |
| 5 | Fasilitas Wisata Tirta | 2 | |
| 6 | Pusat Kesehatan & Kebugaran/ Sarana & Fasilitas Olah Raga | 18 | |
| 7 | Balai Pertemuan Umum | 4 | |
| 8 | Teater/Panggung Terbuka/Tertutup | - | |
| 9 | Bioskop | - | |
| 10 | Rumah Billiard | 9 | |
| 11 | Diskotik/Karaoke/Pub/Café/Niteclub | 2 | |
| 12 | Permainan Ketangkasan | 34 | |
| 13 | Padang Golf | - | |
| 14 | Persewaan Audio Visual | 53 | |
| 15 | Sarana Fasilitas Musik | 3 | |
| 16 | Salon/Tukang Cukur | 60 | |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata

| No | Obyek wisata | Jumlah Pengunjung (orang) | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Pantai Glagah | 132.612 | 117.671 | 105.645 | 108.157 | 110.504 |
| 2 | Pantai Trisik | 57.651 | 61.028 | 53.117 | 47.213 | 41.537 |
| 3 | Waduk Sermo | 17.251 | 11.360 | 12.772 | 10.254 | 14.424 |
| 4 | Pantai Congot | 14.736 | 10.860 | 12.121 | 10.398 | 10.442 |
| 5 | Gua Kiskendo | 9.266 | 2.271 | 3.917 | 4.522 | 3.998 |
| 6 | Puncak Suroloyo | 5.000 | 5.556 | 2.761 | 3.292 | 2.861 |
| Jumlah | | 236.516 | 208.746 | 190.333 | 183.836 | 183.766 |

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.52
Perkembangan Pendapatan Retribusi di Obyek Wisata

| No | Obyek wisata | Retribusi (Rp) | | | | |
|--------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Pantai Glagah | 63.380.845 | 74.388.465 | 101.521.250 | 175.418.745 | 191.160.805 |
| 2 | Pantai Trisik | 28.791.395 | 29.595.840 | 42.970.800 | 58.828.445 | 53.707.480 |
| 3 | Waduk Sermo | 9.253.345 | 5.827.550 | 11.399.200 | 11.677.415 | 16.825.470 |
| 4 | Pantai Congot | 7.925.380 | 5.425.320 | 12.192.050 | 12.460.085 | 10.750.960 |
| 5 | Gua Kiskendo | 2.700.000 | 2.849.490 | 3.284.550 | 2.655.000 | 3.037.500 |
| 6 | Puncak Suroloyo | 1.650.700 | 1.937.000 | 3.437.590 | 3.882.035 | 2.856.050 |
| Jumlah | | 113.701.665 | 120.023.665 | 174.805.440 | 264.921.725 | 277.598.265 |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

2.4.8 Pekerjaan Umum

A. Kebinamargaan

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Kulon Progo seluruhnya sepanjang 1.112,373 Km, dengan perincian dari status dan kewenangan terdiri dari Jalan Nasional dengan panjang jalan 28,570 Km, Jalan Propinsi dengan panjang jalan 159,900 Km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan 923,903 Km.

Ditinjau dari kondisi fisik jalan dapat dirinci kondisi Jalan Nasional mantap, Jalan Propinsi sepanjang 154,900 Km dalam kondisi baik dan sedang, sepanjang 3 Km dalam kondisi rusak, sepanjang 2 Km dalam kondisi rusak berat. Jalan Kabupaten sepanjang 771,366 Km kondisi baik dan sedang, 137,537 Km dalam kondisi rusak dan sepanjang 15 Km dalam kondisi rusak berat.

Kondisi jalan di Kabupaten Kulon Progo sepanjang 1.112,373 Km ditinjau dari kondisi permukaannya adalah Jalan Nasional yang berfungsi sebagai arteri primer sepanjang 28,570 Km seluruhnya dengan permukaan aspal, Jalan Propinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer sepanjang 159,900 Km semuanya dengan permukaan aspal, dan Jalan Kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer dan sebagian kecil kolektor primer dengan total panjang 923,903 Km terdiri sepanjang 487,826 Km dengan permukaan aspal, 251,032 Km dengan permukaan kerikil dan sepanjang 185,045 Km masih dengan kondisi permukaan tanah.

Ditinjau dari kelas jalan dapat dibedakan menjadi : Jalan Nasional yang berfungsi sebagai arteri primer sepanjang 28,570 Km seluruhnya mempunyai kelas jalan I, dengan tekanan gandar sampai 7 ton; Jalan Propinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer panjang 159,900 Km keseluruhannya mempunyai kelas

jalan II, dengan tekanan gandar 5 ton; dan Jalan Kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer kelas III tekanan gandar 3,5 ton dan sebagian kecil kolektor primer dengan total panjang jalan 923,903 Km sepanjang 93,174 Km mempunyai kelas jalan III, 391,242 Km dengan kelas jalan III A, 256,732 Km dengan kelas jalan III B dan sepanjang 182,755 Km mempunyai kelas jalan III C.

Kondisi tanah wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang berupa perbukitan sangat labil dan mudah longsor, sementara kondisi tanah pada wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian selatan yang berupa dataran rawan banjir dengan kemampuan daya dukung tanah kecil. Untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas jalan perlu diupayakan melalui pemeliharaan rutin dan berkala serta peningkatan dan pembangunan.

Kondisi jalan di ruas jalan Kabupaten dapat dibedakan menurut jenis permukaan dan menurut kondisi jalan itu sendiri, adapun kondisi jalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53
Data Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten

| No. | Jenis dan Kondisi | Tahun 2002 | Tahun 2003 | Tahun 2004 | Tahun 2005 |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Menurut Jenis Permukaan | | | | |
| | a. Jalan Beraspal | 453,956 km | 478,526 km | 487,826 km | 492,326 km |
| | b. Jalan Kerikil | 200,502 km | 252,732 km | 251,032 km | 248,532 km |
| | c. Jalan Tanah | 269,445 km | 192,645 km | 185,045 km | 183,045 km |
| | Jumlah | 923,903 km | 923,903 km | 923,903 km | 923,903 km |
| 2 | Menurut Kondisi | | | | |
| | a. Jalan Baik | 313,127 km | 364,574 km | 372,433 km | 378,556 km |
| | b. Jalan Sedang | 384,933 km | 394,933 km | 398,933 km | 406,381 km |
| | c. Jalan Rusak | 203,843 km | 152,396 km | 137,537 km | 126,966 km |
| | d. Jalan Rusak Berat | 22,000 km | 12,000 km | 15,000 km | 12,000 km |
| | Jumlah | 923,903 km | 923,903 km | 923,903 km | 923,903 km |

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Kulon Progo

Sebagai penghubung prasarana jalan digunakan jembatan yang tersebar di beberapa ruas jalan, baik itu di sepanjang jalan Negara, jalan Propinsi, dan jalan Kabupaten. Konstruksi jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari berbagai jenis, antara lain: jembatan dengan konstruksi baja, jembatan konstruksi beton, jembatan gantung, dan lainn jenis konstruksi.

Jembatan yang berada di ruas jalan Negara berjumlah 12 unit dan 62 unit jembatan di sepanjang jalan Propinsi. Untuk jembatan yang ada di ruas jalan Kabupaten sejumlah 354 unit dengan kondisi 329 baik dan 25 rusak.

Lampu penerangan jalan sebagai kelengkapan jalan dalam melayani pemakai jalan, sampai akhir tahun 2004 jumlah LPJU terpasang 1.056 titik dengan total daya 361.950 VA. Distribusi lampu penerangan jalan meliputi Kecamatan Wates 629 titik lampu, Pengasih 181 titik lampu, Panjatan 15 titik, Sentolo 75 titik, Temon 49 titik, Lendah 13 titik, Nanggulan 19 titik, Kalibawang 29 titik, Kokap 9 titik, Girimulyo 9 titik, Samigaluh 11 titik, dan Galur 17 titik. Dari jumlah 1.056 titik terdapat 80%-90% titik nyala.

Untuk bisa memberikan dukungan yang lebih optimal dalam pengembangan sumber daya manusia terutama dalam pelayanan publik maka difokuskan penanganan jalan pada jaringan jalan yang strategis. Jaringan jalan strategis di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan perencanaan mempunyai panjang 556,134 km, dengan kondisi seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Jaringan Jalan Strategis menurut Jenis Permukaan dan Kondisi

| No. | Jenis dan Kondisi | Panjang |
|-----|-------------------------|------------|
| 1 | Menurut Jenis Permukaan | |
| | a. Jalan Beraspal | 487,826 km |
| | b. Jalan Perkerasan | 251,032 km |
| 2 | Menurut Kondisi | |
| | a. Jalan Aspal Baik | 146,348 km |
| | b. Jalan Aspal Sedang | 219,522 km |
| | c. Jalan Rusak | 121,956 km |

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Kulon Progo

B. Pengairan

Penduduk Kabupaten Kulon Progo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sehubungan dengan hal tersebut penanganan kegiatan sumber daya air dan irigasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Jaringan irigasi primer 54,70 km dengan kondisi baik 80%, rusak ringan 10%, dan rusak berat 10%; jaringan irigasi sekunder 156,227 km dengan kondisi baik 65%, rusak ringan 15%, dan rusak berat 20%; sedangkan jaringan irigasi tersier 168,48 km dengan kondisi baik 45%, rusak ringan 25%, dan rusak berat 12%. Kemudian untuk aliran pembuangan (drainase) kondisi baik 65%, rusak ringan 23%, dan rusak berat 12%.

Luasan jangkauan layanan irigasi, sebagai berikut: layanan irigasi teknis 8.412 Ha, layanan irigasi ½ teknis termasuk irigasi desa 1.194 Ha, layanan irigasi lahan pantai 300 Ha. Luas lahan pertanian seluas 12.000 Ha, sedangkan luas lahan jangkauan irigasi baru mencapai 9.906 Ha, lainnya merupakan lahan dengan pengairan tadah hujan.

Keadaan sawah di Kabupaten Kulon Progo seluas 10.256 Ha, terdiri dari :

- 2 daerah irigasi besar > 500 Ha = 9.052 Ha
- 2 daerah setengah teknis = 323 Ha
- 52 daerah irigasi kecil (irigasi desa) = 881 Ha
- Panjang saluran pembawa primer 40 km, saluran sekunder 140 km, dan jumlah bangunan 1.500 buah
- Panjang saluran pembuang 150 km, jumlah bangunan 495 buah dan tanggul banjir 38 km.
- Jumlah P3A = 230 unit
- Jumlah Gabungan P3A = 11 D.I. Sekunder
- Jumlah IP3A = 5 Induk Gabungan
- Jumlah pendapatan dari 230 unit dalam satu tahun sebesar Rp. 151.000.000,- dari target Rp. 250.000.000,-

Sumber air utama untuk irigasi dari Sungai Progo melalui bangunan pengambilan bebas (*Intake*) Kalibawang dan Sapon, sedangkan suplesi air irigasi untuk sebagian lahan pertanian di Pengasih, Wates, Temon berasal dari Waduk Sermo. Kondisi bangunan *intake* Sapon pada 10 th terakhir tidak berfungsi dan saluran induk (primer), Kalibawang sistem maupun Sapon sistem sudah berumur lebih 30 tahun sehingga banyak terjadi kerusakan. Kerusakan tersebut mengakibatkan tingkat kebocoran air cukup tinggi (hampir mencapai 35%). Selain sumber air utama tersebut, sumber air yang ada (mata air) banyak yang mati/tidak berfungsi sebagai akibat/dampak pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan mengabaikan konservasi sumber daya air (Sumber daya alam).

Pelaksana dan penanggungjawab operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan oleh masyarakat (P3A) bekerja sama dengan pemerintah. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 3 Induk P3A, 11 Gabungan P3A dan 230 unit P3A, dengan kondisi mayoritas masih merupakan pemula dan madya, sedangkan yang mandiri tidak lebih dari 5%.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian selatan dari Brosot sampai dengan Temon merupakan daerah rawan banjir karena merupakan dataran rendah terletak di tengah 3 sungai besar yaitu Progo, Serang, dan Bogowonto. Penanganan banjir yang telah dilaksanakan melalui Proyek Penanganan Banjir

dan Pengaman Pantai South Java Flood Control Sector Project (PBPP/SJFCSP) dampak positifnya sudah dirasakan masyarakat.

Disamping hal diatas, terjadi beberapa longsor pada tebing Sungai Progo dan Serang, yang lokasinya di dekat permukiman sehingga membahayakan dan bisa mengakibatkan terjadinya banjir di sekitarnya. Kondisi lain menunjukkan adanya kerusakan lingkungan/ekosistem yang cukup parah baik di daerah hulu, tengah maupun hilir di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memberikan dampak terjadinya penurunan neraca air, baik air tanah, air permukaan maupun air baku.

Untuk menangani pengelolaan sumber daya air maupun mengurangi bencana alam yang diakibatkan oleh banjir maupun tanah longsor yang rutin terjadi setiap tahun, diperlukan adanya penanganan yang terpadu dan menyeluruh serta pembagian peran yang konkrit antar pelaku pembangunan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten baik berupa kewenangan maupun pembiayaan.

C. Keciptakarya

Jalan dan jembatan desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa, tetapi untuk lebih meningkatkan kondisinya maka Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa stimulan aspal dan semen. Kondisi jalan desa, belum semua memenuhi persyaratan geometris jalan serta belum terpenuhinya persyaratan sebagai jalan lingkungan.

Sumber air bersih utama di Kabupaten Kulon Progo adalah Clereng dan Waduk Sermo. Sedangkan sumber air lainnya merupakan mata air kecil di Perbukitan Menoreh. Kegiatan penyediaan, pengolahan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kulon Progo masih mempunyai kendala, antara lain suplai air bersih pada musim kemarau belum mencukupi, karena mengalami penurunan debit air dan distribusi air bersih terhambat oleh kondisi topografi.

Sarana sanitasi air wilayah Kabupaten Kulon Progo secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk), penyedotan lumpur tinja hanya terbatas di wilayah kota Wates, dan sarana pembuangan akhir lumpur tinja (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu/IPLT) hanya tersedia di RSUD Wates.

Secara umum permasalahan drainase di Kabupaten Kulon Progo adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara, sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan permukiman.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan secara umum di kota Wates sudah mencukupi, sedang di wilayah lain masih kurang. Pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ringinardi masih menyisakan beberapa persoalan dengan lingkungan sekitar yang perlu diselesaikan, seperti polusi bau, lalat, dan licit.

Perumahan dan permukiman di Kabupaten Kulon Progo tumbuh lambat dikarenakan prosentase penduduk Kabupaten Kulon Progo yang menghuni rumah banyak berpola keluarga besar (*extended family*) dimana rumah dihuni lebih dari satu keluarga, selain itu dikarenakan migrasi keluar terutama pada kelompok usia produktif cukup tinggi, daya beli masyarakat untuk hunian siap pakai masih rendah. Prasarana dasar di hunian siap pakai belum terlengkapi sepenuhnya dan kesadaran serta partisipasi masyarakat di dalam pengelolaannya belum optimal. Untuk meningkatkan kesehatan, keindahan dan memberikan kenyamanan serta pelayanan masyarakat diperlukan adanya ruang terbuka, taman dan fasilitas olah raga.

2.5 PEMERINTAHAN UMUM

Sejak diberlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah, kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah No. 10, 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2000 meliputi:

1. Sekretariat daerah terdiri dari 8 (delapan) bagian dan sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) bagian.
2. Dinas daerah terdiri dari 9 (sembilan) dinas.
3. Lembaga teknis Daerah terdiri dari 4 (empat) badan atau 8 (delapan) kelas.
4. Kecamatan terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan.
5. UPTD terdiri 7 (tujuh) UPTD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada September 2005 sebanyak 8.809 personil yang terdistribusi pada unit-unit kerja tersebut di atas.

Atas dasar hasil analisis kebutuhan pada tahun 2003 yang mengidentifikasi bahwa semua instansi kekurangan pegawai sehingga menyulitkan dalam pendistribusian PNS yang betul-betul sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta beban kerja instansi. Hasil analisis kebutuhan dan distribusi PNS dapat dilihat pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
 Hasil Analisis Kebutuhan dan Distribusi PNS
 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per Desember 2004

| No | Kelompok Instansi | Hasil Analisis tahun 2003 | Jumlah Riil/ Bezetting | Kekurangan |
|----|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 238 | 224 | 14 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 41 | 29 | 12 |
| 3 | Badan (4) | 375 | 300 | 75 |
| 4 | Dinas (9) | 8.047 | 7.262 | 557 |
| 5 | Kantor (7) | 293 | 248 | 45 |
| 6 | Kecamatan (12) | 387 | 360 | 27 |
| 7 | UPTD | 119 | 98 | 21 |
| 8 | RSUD Wates dan Puskesmas (20) | 642 | 441 | 243 |
| | JUMLAH | 10.142 | 8.962 | 1.406 |

Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo

Data di atas menunjukkan bahwa kekurangan pegawai masih cukup besar yakni 1.406 orang. Pada akhir tahun 2004 terdapat penambahan sebanyak 99 orang dan yang telah pensiun sekitar 153 orang sehingga jumlah terakhir per September 2005 sebanyak 8.809 orang. Jumlah PNS yang pensiun pada tahun 2002 sebanyak 269 orang, tahun 2003 sebanyak 206 orang, tahun 2004 sebanyak 250 orang, tahun 2005 sebanyak 243 orang, dan tahun 2006 diperkirakan 207 orang (dilihat dari BUP). Jumlah tenaga honorer pada Pemda Kulon Progo saat ini sebanyak 1.952 orang.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta beban kerja secara efisien dan efektif, komposisi pegawai yang ada dilihat dari jenis jabatan sudah cukup ideal. Komposisi tersebut terdiri dari pejabat struktural sekitar 500 orang, pejabat fungsional umum/staf 2.468 orang, dan pejabat fungsional tertentu seperti auditor, arsiparis, perawat, penyuluh pertanian, dan lain-lain sejumlah 5.994 orang. Sementara apabila ditinjau dari tingkatan golongan, untuk golongan I = 80 orang (0,91%), golongan II = 1.512 (17,18%), golongan III = 4.676 (53,13%), dan golongan IV = 2.533 (28,78%).

Sementara itu apabila ditinjau dari tingkat pendidikannya sejak tahun 2002 hingga per September 2005 ini terdapat kecenderungan bahwa pegawai yang berijazah SLTA ke bawah mengalami kecenderungan menurun, tetapi sebaliknya pegawai yang berijazah D-I, D-II, D-III, D-IV, S1, dan S2 mengalami peningkatan.

Tabel 2.56
Komposisi PNS Kab. Kulon Progo Menurut Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
| | | JML | % | JML | % | JML | % | JML | % |
| 1 | SD | 315 | 3,38 | 217 | 2,45 | 188 | 2,12 | 150 | 1,70 |
| 2 | SLTP | 401 | 4,31 | 331 | 3,74 | 298 | 3,36 | 257 | 2,92 |
| 3 | SLTA | 3.152 | 33,84 | 2.853 | 32,23 | 2.752 | 31,05 | 2.671 | 30,32 |
| 4 | D – 1 | 310 | 3,33 | 292 | 3,30 | 249 | 2,81 | 229 | 2,60 |
| 5 | D – 2 | 2.062 | 22,14 | 2.014 | 22,75 | 2.050 | 23,13 | 2.092 | 23,75 |
| 6 | D – 3/SM | 812 | 8,72 | 961 | 10,86 | 961 | 10,84 | 912 | 10,35 |
| 7 | D – 4 | 13 | 0,14 | 13 | 0,15 | 18 | 0,20 | 18 | 0,20 |
| 8 | S – 1 | 2.228 | 23,92 | 2.139 | 24,16 | 2.301 | 25,96 | 2.415 | 27,42 |
| 9 | S – 2 | 21 | 0,23 | 33 | 0,37 | 46 | 0,52 | 65 | 0,74 |
| JUMLAH | | 9.314 | 100 | 8.853 | 100 | 8.863 | 100 | 8.809 | 100 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo

Jumlah pegawai sebanyak 8.809 per September 2005 yang terdiri dari laki-laki 4.845 (55,09%) dan perempuan 3.950 (44,91%), berpendidikan: SD/SLTP sebanyak 407 (4,62%), SLTA sebanyak 2.671 (30,32%), D I-D III sebanyak 3233 (36,7%), D IV dan Sarjana 2433 (27,62%) dan Pasca Sarjana sebanyak 65 orang (0,74%) dengan golongan: I sebanyak 80 orang (0,91%), II sebanyak 1.532 orang (17,43%), III sebanyak 4.639 orang (52,79%), dan IV sebanyak 2.536 orang (28,86%).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, diantaranya adalah :

a. Pelayanan catatan sipil

Meliputi pencari Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta pengangkatan anak, Akta Nikah, dan Akta perceraian. Perkembangannya selama 6 (enam) tahun terakhir di Kabupaten Kulon Progo dapat terlihat pada tabel 2.57

Tabel 2.57
Jumlah Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta pengangkatan anak, Akta Nikah, dan Akta perceraian di Kab Kulon Progo

| No. | Jenis | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Akta Kelahiran | 10.403 | 8.332 | 10.403 | 8.327 | 4.560 | 7.884 |
| 2. | Akta pengangkatan anak | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 3. | Akta kematian | 13 | 4 | 13 | 29 | 35 | 238 |
| 4. | Akta nikah | 252 | 252 | 253 | 250 | 226 | 218 |
| 5. | Akta perceraian | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 |

Sumber data : Dinas Dukcapilkabernas Kabupaten Kulon Progo

b. Pelayanan Ijin

Pelayanan ijin di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh beberapa instansi, meliputi Bappeda, UPPSA, dan Kantor Pertanahan. Pelayanan ijin yang dilakukan oleh Bappeda meliputi ijin penelitian tahun 2002 sebanyak 203, tahun 2003 sebanyak 436 dan pada tahun 2004 menjadi 473, sedang ijin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi pada tahun 2002 sebanyak 38, tahun 2003 sebanyak 26 dan tahun 2004 sebanyak 24. Disamping itu, Bappeda telah mengeluarkan ijin lokasi pada tahun 2005 sebanyak 2 ijin lokasi.

Perijinan yang dilaksanakan oleh UPPSA (Unit Perijinan Pelayanan Satu Atap) adalah meliputi :

1. Reklame terdiri dari papan nama, billboard, spanduk, tempel dan baliho
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
4. Ijin Trayek Pengawasan
5. Ijin Trayek Tetap
6. Ijin Trayek Insidentil
7. Ijin Gangguan (HO)
8. Ijin Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
9. Ijin Pertambangan Daerah
10. Ijin Kesehatan
11. Ijin Praktek Dokter Spesialis
12. Ijin Praktek Dokter Umum
13. Ijin Praktek Dokter Gigi
14. Ijin Praktek Bidan Perawatan
15. Ijin Praktek Rumah Bersalin
16. Ijin Praktek Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin
17. Ijin Praktek Apotek dan Perdagangan Obat
18. Ijin Penggunaan Kios
19. Legalisir Ijin Usaha Konstruksi
20. Pembelian blangko

c. Pelayanan bencana kebakaran

Untuk mengantisipasi terjadi adanya bencana kebakaran, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyediakan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan didukung dengan 24 orang personil.

d. Pelayanan kebutuhan pasar desa dan tradisional

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan sehari-hari terdapat 31 unit pasar tradisional, 6 unit pasar harian, dan 28 unit pasar desa.

e. Pelayanan penyediaan air bersih

Untuk melayani kebutuhan air bersih dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan mengambil sumber mata air dari waduk Sermo, Clereng, Mudal maupun sungai Progo dengan jumlah pelanggan pada tahun 2001 sebanyak 8.622 SR, tahun 2002 sebanyak 9.204 SR, tahun 2003 sebanyak 9.547 SR, dan tahun 2004

sebanyak 10.000, serta tahun 2005 sebanyak 10.495 SR pelanggan, tahun 2006 sebanyak 10.630 SR. Produksi air sebanyak 1.287.511 m³, distribusi 1.245.511 m³, konsumsi sebanyak 932.749 m³, dan tingkat kebocoran 312.762 m³ (25,11 %).

f. Pelayanan keamanan dan ketertiban umum

Pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (39 personil), Linmas dan masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari angka kriminalitas yang relatif kecil.

Tabel 2.58
Data Kejadian Perkara di Kabupaten Kulon Progo

| Tahun | Jenis Perkara | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|-------|---------------|-------|-------------------|------------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| | Pencurian | | | | Pembunuhan | Penganiayaan | Penipuan | Perampokan | Pembegalan | Perkosaan | Pencopetan | Penodongan | |
| | Biasa | Hewan | Dengan Pemberatan | Dengan Kekerasan | | | | | | | | | |
| 2001 | 26 | 9 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 47 |
| 2002 | 38 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 58 |
| 2003 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 25 |
| 2004 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 30 |
| 2005 | 29 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 35 |

Sumber data : Kantor Pol. PP Kabupaten Kulon Progo

g. Pelayanan umum di tingkat desa

Pelayanan umum di tingkat desa dilayani oleh 88 desa dan 930 pedukuhan dengan jumlah personil sebanyak 2.808 orang, terdiri dari 1.148 anggota BPD dan 1.660 aparat pemerintah desa yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 200 ayat 1 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh 2 lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSYDES).

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kabupaten maka Visi Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertera dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah:

”MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN”

Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kabupaten Kulon Progo tersebut maka ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap ke satu (2006 – 2011) masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan visi 20 tahun mendatang (2005 – 2025) adalah sebagai berikut :

“MEMBANGUN KULON PROGO DALAM KEBERSAMAAN MENUJU PENGUATAN EKONOMI LOKAL BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DEMI MEWUJUDKAN MASYARAKAT KULON PROGO YANG MANDIRI, AMAN, SEJAHTERA, DINAMIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Dengan Visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 ini diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil menuju Kabupaten Kulon Progo yang mandiri dan aman.

Yang dimaksud dengan **kebersamaan** adalah sikap dan perilaku yang secara bersama-sama (gotong-royong) pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan **ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan** adalah kegiatan ekonomi yang mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik di wilayah Kabupaten Kulon Progo. **Mandiri** adalah suatu sikap dan tindakan yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berbasis kearifan lokal. **Aman** adalah suatu keadaan daerah yang kondusif dari ancaman dan gangguan. **Sejahtera** adalah suatu keadaan masyarakat Kulon Progo yang tercukupi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara layak. **Dinamis berlandaskan iman dan taqwa** adalah keadaan yang mudah menyesuaikan terhadap perubahan, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang tidak menyimpang dari norma agama dan keyakinan yang dianut agar diperoleh kehidupan yang selaras serasi dan seimbang.

Terwujudnya pencapaian kondisi lima tahun pertama akan menentukan keberhasilan dan menjadi modal dasar tahap berikutnya untuk mencapai visi 20 tahun mendatang

3.2 MISI

Berdasarkan visi RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2011 yang didukung dengan keberhasilan etos kerja ”tirta marga saras” pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan dengan semangat etos kerja yang baru ”membangun desa menumbuhkan kota” maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintah kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Meningkatkan profesionalisme dan jiwa enterpreneur aparaturnya.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Mengembangkan perekonomian rakyat terutama agribisnis dan pariwisata.
6. Memfasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah.
7. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan.
8. Melestarikan budaya dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo saat ini, untuk menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun mendatang diperlukan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta terpelihara dan meningkatnya Iman dan Taqwa. Adapun tantangan dalam 5 tahun mendatang antara lain :

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, rendahnya profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) aparaturnya, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa, belum optimalnya keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan, belum optimalnya pengelolaan potensi agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang mendukung perekonomian daerah serta rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan investasi daerah.

4.1 Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Daerah

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan tersebut di atas maka beberapa faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah :

a. Good governance

Di era globalisasi, pelaksanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu untuk tercapainya keberhasilan pembangunan. Perubahan paradigma dari *government* menjadi *good governance* menuntut

pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai motor penggerak utama, harus berubah karena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola pembangunan yang sentralistik. Di sisi lain menjadikan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Paradigma *good governance* mengharuskan pembagian peran yang seimbang antara Pemerintah, Dunia Usaha/Swasta dan Masyarakat. Dengan perubahan paradigma ini diharapkan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, sehingga tercapai keberhasilan pembangunan.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan keterlibatan Swasta, Masyarakat dan Pemerintah secara proporsional sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Dengan keterlibatan ketiga pilar pembangunan dapat menggerakkan perekonomian daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keberhasilan dan mendukung pertumbuhan pembangunan sektor yang lain.

c. Pemberdayaan masyarakat

Dengan adanya perubahan paradigma dari *government* menjadi *good governance* keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mengalami perubahan. Dalam meningkatkan peran masyarakat yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan diubah perannya menjadi pelaku pembangunan seutuhnya dalam arti masyarakat mampu mengidentifikasi potensi, masalah dan pemecahan serta kebutuhannya. Masyarakat mampu membuat keputusan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sehingga hasil pembangunan yang diperoleh adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi 5 tahun ke depan yang mengedepankan kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo adalah : penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan agrobisnis, agroindustri dan pariwisata didukung dengan infrastruktur yang memadai dilandasi semangat kebersamaan.

4.3 Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode jangka menengah tahun 2006 – 2011, adalah hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan misi yaitu :

9. Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintah kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
10. Meningkatnya profesionalisme dan jiwa enterpreneur aparatur.
11. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
12. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

13. Berkembangnya perekonomian rakyat terutama agribisnis, agroindustri, dan pariwisata.
14. Terfasilitasinya pengembangan dunia usaha dan investasi daerah.
15. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan.
16. Pelestarian budaya dan fungsi lingkungan hidup.

4.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan merupakan kondisi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembangunan pada periode tahun 2006-2011 ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintah kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tolok ukur sasaran :
 - a. Pengawasan dan pengendalian internal meningkat dengan jumlah cakupan pemeriksaan dari tahun 2006 : 128 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 90% diselesaikan; menjadi tahun 2007 : 140 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 92% diselesaikan; tahun 2008 : 154 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 94% diselesaikan; tahun 2009 : 169 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 96% diselesaikan; tahun 2010 : 185 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 98% diselesaikan; dan tahun 2011 : 203 unit pemeriksaan, tindak lanjut temuan 100% diselesaikan.
 - b. Penyediaan informasi dan komunikasi melalui ketersediaan release bagi media massa meningkat dari tahun 2006 : 200 kali menjadi tahun 2007 : 200 kali, tahun 2008 : 220 kali, tahun 2009 : 240 kali, tahun 2010 : 245 kali dan tahun 2011 : 245 kali. Siaran langsung di radio dan televisi (interaktif) meningkat dari tahun 2006 : 32 kali menjadi tahun 2007 : 67 kali, tahun 2008 : 63 kali, tahun 2009 : 63 kali, tahun 2010 : 63 kali dan tahun 2011 : 63 kali. Penerbitan majalah "BINANGUN" pada tahun 2006 : 1400 eksemplar, tahun 2007 : 1400 eksemplar, tahun 2008 : 1500 eksemplar, tahun 2009 : 1500 eksemplar, tahun 2010 : 1500 eksemplar dan tahun 2011 : 1500 eksemplar; serta melalui sebuah website.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2006 dengan jumlah pemilih 314.836 orang, yang berpartisipasi memilih sebanyak 75,66% dan meningkat pada Pilpres tahun 2009 yang berpartisipasi memilih sebanyak 85%.
 - d. Proses pelayanan perijinan semakin baik sehingga waktu pengurusan semakin cepat.
 - e. Meningkatnya kepastian hukum kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan bertambahnya jumlah produk hukum, tahun 2006 sebanyak 351 buah, tahun 2007 sebanyak 363 buah, tahun 2008 sebanyak 363 buah, tahun 2009 sebanyak 363 buah, tahun 2010 sebanyak 365 buah, tahun 2011 sebanyak 365 buah.
2. Meningkatnya profesionalisme dan jiwa enterpreneur aparaturnya dengan tolok ukur sasaran : terlatihnya aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan meningkat dari tahun 2006 : 622 orang, tahun 2007 : 742 orang, tahun 2008 : 681 orang, tahun 2009 : 1.063 orang, tahun 2010 : 917 orang, dan tahun 2011 : 917 orang, sehingga kinerja aparaturnya menjadi efisien dan efektif.

3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tolok ukur sasaran:
 - a. Peraturan Desa tentang program kerja tahunan dan jangka menengah desa sesuai waktu yang ditetapkan untuk masing-masing desa meningkat dari tahun 2006 : 70 desa, tahun 2007 : 75 desa, 2008 : 80 desa, tahun 2009 : 88 desa.
 - b. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perdes tentang perhitungan anggaran sesuai waktu yang ditetapkan untuk masing-masing desa meningkat dari tahun 2006 : 65 desa, tahun 2007: 75 desa; 2008 : 80 desa; 2009 : 88 desa
 - c. Pembentukan dan pengoperasionalan LKM meningkat dari tahun 2006 terbentuk LKM di 22 desa menjadi tahun 2007 terbentuk LKM di 88 desa dan beroperasionalnya LKM tahun 2007 di 44 desa dan tahun 2008 di 88 desa. Pemantapan program dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
 - d. Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani bertambah dari tahun 2006 : 84 kelompok tani, menjadi tahun 2007 : 126 kelompok tani, tahun 2008 : 164 kelompok tani, tahun 2009 : 205 kelompok tani, tahun 2010 : 246 kelompok tani, dan tahun 2011 : 295 kelompok tani.
 - e. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program keluarga berencana meningkat dari tahun 2006 : 52.489 peserta menjadi tahun 2007 : 54.797 peserta, tahun 2008 : 56.082 peserta, tahun 2009 : 57.208 peserta, tahun 2010 : 58.323 peserta, dan tahun 2011 : 59.588 peserta.
 - f. Dana swadaya masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan meningkat dari tahun 2006 Rp 20.457.304.065,- menjadi tahun 2007 Rp. 21.457.304.065,-; tahun 2008 Rp. 22.957.304.065,-; tahun 2009 Rp. 24.707.304.065,-; tahun 2010 Rp. 26.707.304.065,-; dan tahun 2011 Rp. 29.207.304.065,-

4. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan tolok ukur sasaran :
 - a. Kualitas hidup manusia meningkat dengan tolok ukur sebagai berikut :
 - IPM Meningkat dari tahun 2006 sebesar 71,75, menjadi tahun 2007 : 71,86, tahun 2008 : 72,18, tahun 2009 : 72,50, tahun 2010 : 72,64, tahun 2011 : 73,02
 - Usia Harapan hidup meningkat dari tahun 2006 : 73,4 tahun menjadi tahun 2007 : 73,7 tahun; tahun 2008 : 74,0 tahun; tahun 2009 : 74,4 tahun; tahun 2010 : 74,7 tahun dan tahun 2011 : 75,0 tahun.
 - b. PDRB per kapita meningkat dari tahun 2006 sebesar Rp. 6.412.181,- menjadi tahun 2007 : Rp. 7.211.393,5,-; tahun 2008 : Rp. 7.959.099,-; tahun 2009 : Rp. 8.888.919,-; tahun 2010 : Rp. 10.210.472,-; dan tahun 2011 : Rp. 11.393.197,-
 - c. Ketersediaan pangan beras meningkat dari tahun 2006 : 69.803,26 ton, menjadi tahun 2007 : 71.581,54 ton, tahun 2008 : 73.421,19 ton, tahun 2009 : 75.256,72 ton, tahun 2010 : 77.138,13 ton, dan tahun 2011 : 79.066,59 ton.
 - d. Ketersediaan pangan setara beras meningkat dari tahun 2006 : 328.528,98 ton, menjadi tahun 2007 : 335.778,23 ton, tahun 2008 : 343.165,35 ton, tahun 2009 : 350.714,99 ton, tahun 2010 : 358.430,72 ton, dan tahun 2011 : 366.316,19 ton.
 - e. Konsumsi makan ikan meningkat dari tahun 2006 : 10, 07 kg/kapita/tahun, menjadi tahun 2007 : 12,08 kg/kapita/tahun, tahun 2008 : 14,50 kg/kapita/hr,

tahun 2009 : 16,67 kg/kapita/hr, tahun 2010 : 18,34 kg/kapita/hr, dan tahun 2011 : 20,17 kg/kapita/hr.

- f. Konsumsi protein hewani meningkat dari tahun 2006 : 5,185 gr/kapita/hr, menjadi tahun 2007 : 5,444 gr/kapita/hr, tahun 2008 : 5,716 gr/kapita/hr, tahun 2009 : 6,002 gr/kapita/hr, tahun 2010 : 6,302 gr/kapita/hr, dan tahun 2011 : 6,617 gr/kapita/hr.
- g. Keluarga Pra Keluarga Sejahtera menurun dari tahun 2006 : 48.001 KK menjadi tahun 2007 : 47.271 KK, tahun 2008 : 46.445 KK, tahun 2009 : 45.992 KK, tahun 2010 : 45.233 KK, dan tahun 2011 : 44.845 KK. Keluarga Sejahtera I meningkat dari tahun 2006 : 22.678 KK menjadi tahun 2007 : 23.556 KK, tahun 2008 : 24.365 KK, tahun 2009 : 24.878 KK, tahun 2010 : 25.495 KK, dan tahun 2011 : 26.329 KK.
- h. Pelayanan Pendidikan meningkat dengan menyediakan anggaran tiap tahunnya mendekati 20%. Hal tersebut dilakukan dengan pemberantasan buta aksara melalui program Kejar Paket A Fungsional Tahun 2006: 2.313 warga belajar, 2007 sebanyak 2.143 warga belajar, tahun 2008 sebanyak 1.753 warga belajar, tahun 2009 sebanyak 363 warga belajar.

Program Kejar Paket A Setara SD Tahun 2006 sebanyak 588 warga belajar, 2007 sebanyak 448 warga belajar, tahun 2008 sebanyak 368 warga belajar, tahun 2009 sebanyak 268 warga belajar : tahun 2010 : 168, tahun 2011 sebanyak 48 warga belajar . Wajar 9 tahun pada tahun 2007 : 320 anak, tahun 2008 turun menjadi 270 anak, tahun 2009 turun menjadi 190, tahun 2010 turun menjadi 80 anak, tahun 2011 turun menjadi 30 anak. APK SD/MI tahun 2006 sebesar 105.12, tahun 2007 menjadi 105,25, tahun 2008 105,25, tahun 2009 105.25, tahun 2010: 105.50, tahun 2011: 105.75. APM SD/MI tahun 2006 sebesar 88.80, tahun 2007 menjadi 90.01, tahun 2008 92.00, tahun 2009 95.00, tahun 2010: 97.75, tahun 2011: 100

APK SMP/MTs tahun 2006 sebesar 110.19, tahun 2007 menjadi 112.00, tahun 2008 115.00, tahun 2009 120.25, tahun 2010: 122.00, tahun 2011: 125.50. APM SMP/MTs tahun 2006 sebesar 80.81, tahun 2007 menjadi 90.00, tahun 2008 92.00, tahun 2009 sebesar 95.00, tahun 2010: 98.05 tahun 2011:100

APK SMA/MA tahun 2006 sebesar 75.97, tahun 2007 menjadi 77.80, tahun 2008 80.01, tahun 2009 87.00, tahun 2010: 89.00, tahun 2011: 92.05. APM SMA/MA tahun 2006 sebesar 75.97, tahun 2007 menjadi 77.75, tahun 2008 80.00, tahun 2009 sebesar 90.00, tahun 2010: 95 tahun 2011:100

Tingkat kelulusan SD/MI tahun 2006 sebesar 100%, tahun 2007 100%, tahun 2008 100%, tahun 2009 : 100%, tahun 2010: 100%, tahun 2011 : 100%. Tingkat kelulusan SMP tahun 2006 sebesar 87,48%, tahun 2007 : 79,21 %, tahun 2008 : 90%, tahun 2009 : 95%, tahun 2010 : 97%, tahun 2011 : 100%. Tingkat kelulusan MTs tahun 2006 sebesar 82,67 %, tahun 2007 : 82,69 %, tahun 2008 : 85 %, tahun 2009 : 90 %, tahun 2010 : 95%, tahun 2011: 100 %. Tingkat kelulusan SMA tahun 2006: 88,03 %, tahun 2007 : 94,43%, tahun 2008 : 95%, tahun 2009 : 97%, tahun 2010 : 99% tahun 2011: 100 %. Tingkat kelulusan MA

tahun 2006: 77,40 %, tahun 2007 : 84,01 %, tahun 2008 : 90%, tahun 2009 : 95%, tahun 2010 : 97% tahun 2011: 100 %. Tingkat kelulusan SMK tahun 2006: 88,72 %, tahun 2007 : 90,24 %, tahun 2008 : 92%, tahun 2009 : 95%, tahun 2010 : 97% tahun 2011: 100 %.

- i. Sarana Prasarana Pendidikan dilihat dari kondisi gedung SD/MI , jumlah ruang kelas yang rusak tahun 2006 1764 ruang , tahun 2007 berkurang menjadi 1488 ruang, tahun 2008 berkurang menjadi 1121 ruang, tahun 2009 berkurang menjadi 819 ruang, tahun 2010 berkurang menjadi 447 ruang, tahun 2011 berkurang menjadi 74 ruang. Gedung SMP/MTs, jumlah ruang kelas yang rusak tahun 2006 : 92 ruang, tahun 2007 berkurang menjadi 63 ruang tahun 2008 berkurang menjadi 41 ruang tahun 2009 berkurang menjadi 23 ruang tahun 2010 menjadi 0 ruang. Gedung SMA/MA/SMK , jumlah ruang kelas yang rusak tahun 2006 : 74 ruang , tahun 2007 berkurang menjadi 48 ruang, tahun 2008 berkurang menjadi 23 ruang, tahun 2009 berkurang menjadi 11 ruang, tahun 2010 : 0 ruang.

Penambahan lokal pembelajaran baru (ruang : laboratorium bahasa, komputer, ketrampilan, laborotom IPA, perpustakaan) SMP/SMA/SMK, tahun 2007 sebanyak 28 lokal , tahun 2008 sebanyak 46 lokal ,tahun 2009 sebanyak 42 lokal, tahun 2010 sebanyak 22 lokal, tahun 2011 sebanyak 17.

- j. Pembinaan perpustakaan desa, sekolah dan rumah ibadah pada tahun 2006 : 9 perpustakaan, tahun 2007 : 9 perpustakaan, tahun 2008 : 18 perpustakaan, tahun 2009 : 27 perpustakaan, tahun 2010 : 36 perpustakaan, dan tahun 2011 : 42 perpustakaan.
- k. Pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling dilihat dari jumlah pengunjung meningkat dari tahun 2006 : 24.652 orang, menjadi tahun 2007 : 26.870 orang, tahun 2008 : 29.288 orang, tahun 2009 : 31.923 orang, tahun 2010 : 34.796 orang, dan tahun 2011 : 37.927 orang. Koleksi buku yang dimiliki meningkat dari tahun 2006 : 19.120 eksemplar, menjadi tahun 2007 : 24.580 eksemplar, tahun 2008 : 26.080 eksemplar, tahun 2009 : 28.580 eksemplar, tahun 2010 : 31.380 eksemplar, dan tahun 2011 : 34.380 eksemplar.
- l. Kualitas Kesehatan masyarakat dilihat dari jumlah kematian ibu melahirkan menurun pada tahun 2006 : 6 orang menjadi tahun 2007 : 0 orang; jumlah kematian bayi menurun dari tahun 2006 : 61 bayi menjadi tahun 2007 : kurang dari 50 bayi; dan jumlah gizi buruk balita pada tahun 2006 : 1,24 persen, tahun 2007 : < 2 persen; kesadaran berobat pada masyarakat dilihat dari jumlah kunjungan ke Puskesmas/RSU meningkat dari tahun 2006 : 82,88% menjadi tahun 2007 : 85%. Tarif pelayanan kesehatan terjangkau dan tidak membebani masyarakat tetapi sebagian dibebankan kepada APBD.
- m. Pelayanan air bersih kepada masyarakat meningkat dari tahun 2006 : 10.854 pelanggan menjadi tahun 2007 : 11.354 pelanggan, tahun 2008 : 11.854 pelanggan, tahun 2009 : 12.354 pelanggan, tahun 2010 : 12.854 pelanggan, dan tahun 2011 : 13.354 pelanggan.

- n. Rumah yang layak huni dan memenuhi syarat-syarat kesehatan meningkat dari tahun 2006 : 55%, tahun 2007 : 60 %, tahun 2008 : 65 %, tahun 2009 : 70%, tahun 2010 : 75 % dan tahun 2011 : 80 %.
 - o. Penanganan air bersih pedesaan pada tahun 2006 5 unit meningkat menjadi tahun 2007 : 8 unit, tahun 2008 : 22, tahun 2009 : 23 unit, tahun 2010 : 25 unit dan tahun 2011 : 26 unit.
 - p. Sarana dan prasarana olahraga secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan.
5. Berkembangnya perekonomian rakyat terutama agribisnis, agroindustri dan pariwisata dengan tolok ukur sasaran :
- a. Saluran irigasi sepanjang 108,913 km, peningkatan kualitas dari tahun 2006 sampai tahun 2011 sepanjang 15 km (13,77%).
 - b. Produksi padi dan palawija meningkat dari tahun 2006 : 195.643,35 ton, menjadi tahun 2007 : 205.425,52 ton, tahun 2008 : 213.642,54 ton, tahun 2009 : 224.324,67 ton, tahun 2010 : 233.297,65 ton, dan tahun 2011 : 244.962,53 ton.
 - c. Produksi sayur-sayuran meningkat dari tahun 2006 : 40.970,46 ton, menjadi tahun 2007 : 45.067,51 ton, tahun 2008 : 49.574,25 ton, tahun 2009 : 54.531,68 ton, tahun 2010 : 59.984,85 ton, dan tahun 2011 : 65.983,34 ton.
 - d. Produksi buah-buahan meningkat dari tahun 2006 : 48.299,44 ton, menjadi tahun 2007 : 53.129,38 ton, tahun 2008 : 58.442,32 ton, tahun 2009 : 64.286,55 ton, tahun 2010 : 70.715,21 ton, dan tahun 2011 : 77.786,73 ton.
 - e. Produksi tanaman obat meningkat dari tahun 2006 : 7.304,10 ton, menjadi tahun 2007 : 8.399,72 ton, tahun 2008 : 9.659,67 ton, tahun 2009 : 10.625,64 ton, tahun 2010 : 11.688,20 ton, dan tahun 2011 : 12.857,02 ton.
 - f. Produksi tanaman perkebunan meningkat dari tahun 2006 : 58.776,40 ton, menjadi tahun 2007 : 64.654,04 ton, tahun 2008 : 71.119,44 ton, tahun 2009 : 78.231,39 ton, tahun 2010 : 86.054,53 ton, dan tahun 2011 : 94.659,98 ton.
 - g. Populasi ternak besar meningkat dari tahun 2006 : 46.118 ekor, menjadi tahun 2007 : 48.424 ekor, tahun 2008 : 50.845 ekor, tahun 2009 : 53.387 ekor, tahun 2010 : 56.057 ekor, dan tahun 2011 : 58.860 ekor.
 - h. Populasi ternak kecil meningkat dari tahun 2006 : 100.639 ekor, menjadi tahun 2007 : 105.671 ekor, tahun 2008 : 110.954 ekor, tahun 2009 : 116.502 ekor, tahun 2010 : 122.327 ekor, dan tahun 2011 : 128.444 ekor.
 - i. Populasi unggas meningkat dari tahun 2006 : 2.578.330 ekor, menjadi tahun 2007 : 2.681.463 ekor, tahun 2008 : 2.788.722 ekor, tahun 2009 : 2.900.271 ekor, tahun 2010 : 3.016.281 ekor, dan tahun 2011 : 3.136.933 ekor.
 - j. Produksi daging meningkat dari tahun 2006 : 5.860.275 kg, menjadi tahun 2007 : 6.153.289 kg, tahun 2008 : 6.460.953 kg, tahun 2009 : 6.784.001 kg, tahun 2010 : 7.123.201 kg, dan tahun 2011 : 7.479.361 kg.
 - k. Produksi telur meningkat dari tahun 2006 : 4.109.533 kg, menjadi tahun 2007 : 4.315.010 kg, tahun 2008 : 4.530.760 kg, tahun 2009 : 4.757.298 kg, tahun 2010 : 4.995.163 kg, dan tahun 2011 : 5.244.921 kg.

- l. Populasi tanaman kayu bernilai ekonomis tinggi meningkat dari tahun 2006 : 9.824.100 batang, menjadi tahun 2007 : 10.217.064 batang, tahun 2008 : 10.625.747 batang, tahun 2009 : 11.050.776 batang, tahun 2010 : 11.492.807 batang, dan tahun 2011 : 11.952.520 batang.
 - m. Produksi ikan budidaya meningkat dari tahun 2006 : 2.929.906 kg, menjadi tahun 2007 : 3.662.383 kg, tahun 2008 : 4.394.860 kg, tahun 2009 : 5.054.089 kg, tahun 2010 : 5.559.497 kg, dan tahun 2011 : 6.115.447 kg.
 - n. Produksi ikan tangkap meningkat dari tahun 2006 : 1.285.000 kg, menjadi tahun 2007 : 1.349.250 kg, tahun 2008 : 1.484.175 kg, tahun 2009 : 1.706.801 kg, tahun 2010 : 1.962.821 kg, dan tahun 2011 : 2.355.386 kg.
 - o. Kunjungan Wisatawan meningkat rata-rata per tahun sebesar 5% pada tahun 2006 : 221.272 orang.
 - p. Sarana prasarana penunjang pariwisata meningkat rata-rata sebesar 5%,
 - q. Jumlah pameran dan promosi wisata pada tahun 2006 : 5 kali, setiap tahun meningkat rata-rata 20%.
6. Terfasilitasinya pengembangan dunia usaha dan investasi daerah dengan tolok ukur sasaran :
- a. Nilai Investasi mengalami kenaikan dari tahun 2006 : Rp. 89.725.997,-; menjadi tahun 2007 : Rp. 99.452.295.075,-; tahun 2008 : Rp. 110.232.932.861,-; tahun 2009 : Rp. 122.182.172.807,-; tahun 2010 : Rp. 135.426.720.340,-; dan tahun 2011 : Rp. 150.106.976.825,-
 - b. Infrastruktur semakin baik, dengan kondisi jalan kabupaten sepanjang 903,303 km yang semakin baik dan mantap sebagai berikut :

| No. | Kondisi Jalan (km) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Baik | 426,226 | 465,756 | 505,286 | 520,286 | 535,286 |
| 2. | Rusak Sedang | 48,270 | 34,540 | 20,810 | 20,810 | 20,810 |
| 3. | Rusak Berat | 47,487 | 36,687 | 25,887 | 25,887 | 25,887 |
| 4. | Kerikil/Tanah | 401,920 | 386,920 | 371,920 | 356,920 | 341,920 |
| | Jumlah | 923,903 | 923,903 | 923,903 | 923,903 | 923,903 |

- c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang meningkat menjadi 40 % yang ditunjukkan dengan ruang/wilayah yang mempunyai ijin pemanfaatan, tahun 2006 sebanyak 20 % , , tahun 2007 sebanyak 25 % , , tahun 2008 sebanyak 30 % , , tahun 2009 sebanyak 35 % , , tahun 2010 sebanyak 40 % .
- d. Pelayanan kebutuhan listrik dilihat dari pengguna/pelanggan meningkat dari tahun 2006 : 76.884 pelanggan menjadi tahun 2007 : 79.675 pelanggan, tahun 2008 : 82.567 pelanggan, tahun 2009 : 85.564 pelanggan, tahun 2010 : 88.670 pelanggan, dan tahun 2011 : 91.889 pelanggan.
- e. Sarana prasarana perdagangan berupa los dan kios pasar dari tahun 2006 : 349 los, 690 kios, meningkat menjadi 441 los dan 872 kios pada tahun 2011.
- f. Menurunnya angka pengangguran dari 3,13% pada tahun 2006 menjadi 2,03% pada tahun 2011 dan bertambahnya jam kerja dari <35 jam menjadi 36 jam

7. Meningkatnya ketentraman, ketertiban serta keimanan dan ketaqwaan dengan tolok ukur sasaran :
- a. Angka kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun 2006 : 12 kasus, menjadi tahun 2007 (sampai bulan Juni) : 10 kasus, tahun 2008 sampai tahun 2011 diharapkan semakin menurun, didukung dengan tingkat kesadaran dan sarana prasarana yang semakin lengkap.
 - b. Angka bencana kebakaran pada tahun 2006 : 8 kasus, menjadi tahun 2007 : 10 kasus, tahun 2008 : 9 kasus, tahun 2009 : 8 kasus, tahun 2010 : 7 kasus, dan tahun 2011 : 6 kasus.
 - c. Angka bencana alam pada tahun 2006 : 39 kasus, tahun 2007 (sampai bulan Juni) : 42 kasus, tahun 2008 sampai tahun 2011 diharapkan semakin menurun.
 - d. Angka kriminalitas tahun 2006 : 18 kasus, tahun 2007 (sampai bulan Juni) : 15 kasus, tahun 2008 sampai tahun 2011 diharapkan semakin menurun.
 - e. Tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan daerah menurun dari tahun 2006 : 267 kasus, menjadi tahun 2007 : 215 kasus, tahun 2008 : 175 kasus, tahun 2009 : 140 kasus, tahun 2010 : 112 kasus, dan tahun 2011 : 90 kasus.
 - f. Jumlah tempat ibadah yang tersedia pada tahun 2006 untuk agama Islam 2.048, Kristen 41, Katholik 14, dan Budha 3; tahun 2007 sampai tahun 2011 meningkat 0,34% per tahun.
 - g. Jumlah penduduk yang melaksanakan ibadah Haji meningkat dari tahun 2006 : 225 orang, menjadi tahun 2007 : 254 orang, tahun 2008 : 274 orang, tahun 2009 : 294 orang, tahun 2010 : 314 orang, dan tahun 2011 : 324 orang.
 - h. Jumlah pondok pesantren tahun 2006 : 51, tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 3,92%.
 - i. Jumlah TPA/TKA tahun 2006 : 498, tahun 2007 : 500, tahun 2008 : 502, tahun 2009 : 504, tahun 2010 : 506, dan tahun 2011 : 508.
 - j. Jumlah Majelis Taklim Binaan tahun 2006 : 42 buah, tahun 2007 : 244 buah, tahun 2008 : 532 buah, tahun 2009 : 760 buah, tahun 2010 : 930 buah, tahun 2011 : 930 buah.
 - k. Jumlah Sekolah Minggu/Pendampingan Iman Anak tahun 2006 untuk agama Kristen : 30, Katholik : 121; tahun 2007 : agama Kristen : 30, Katholik : 121; tahun 2008 : agama Kristen : 30, Katholik : 121; tahun 2009 : agama Kristen : 30, Katholik : 121; tahun 2010 : agama Kristen : 30, Katholik : 121; dan tahun 2011 : agama Kristen : 30, Katholik : 121.
 - l. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) meningkat dari tahun 2006 : 65 buah dengan warga belajar : 7.400 orang menjadi tahun 2007 : 68 buah dengan warga belajar : 10.523 orang, tahun 2008 : 72 buah dengan warga belajar : 16.213 orang, tahun 2009 : 78 buah dengan warga belajar : 19.533 orang, tahun 2010 : 81 buah dengan warga belajar : 22.680 orang dan tahun 2011 : 88 buah dengan warga belajar : 23.100 orang, dengan program kegiatan : 1). Kejar Paket

A Fungsional. 2). Kejar Paket A setara SD. 3). Kejar Paket B setara SLTP. 4). Kejar Paket C setara SMA. 5). Majelis Taklim.

8. Pelestarian budaya dan fungsi lingkungan hidup dengan tolok ukur sasaran :
 - a. Jumlah kelompok seni dan budaya meningkat dari tahun 2006 : 1.232 kelompok, tahun 2007 : 1.238 kelompok, tahun 2008 : 1.245 kelompok, tahun 2009 : 1.253 kelompok, tahun 2010 : 1.258 kelompok, dan tahun 2011 : 1.264 kelompok.
 - b. Aktualisasi nilai-nilai budaya meningkat dengan bertambahnya jumlah event dari tahun 2006 : 27 event menjadi tahun 2007 : 29 event, tahun 2008 : 32 event, tahun 2009 : 36 event, tahun 2010 : 40 event, dan tahun 2011 : 46 event.
 - c. Luas lahan kritis menurun dari tahun 2006 : 7.094,70 ha, menjadi tahun 2007 : 6.739,96 ha, tahun 2008 : 6.402,96 ha, tahun 2009 : 6.082,81 ha, tahun 2010 : 5.778,67 ha, dan tahun 2011 : 5.489,74 ha.
 - d. Luas hutan rakyat meningkat dari tahun 2006 : 16.373,50 ha, menjadi tahun 2007 : 17.028,44 ha, tahun 2008 : 17.709,58 ha, tahun 2009 : 18.417,96 ha, tahun 2010 : 19.154,68 ha, dan tahun 2011 : 19.920,87 ha.
 - e. Menurunnya jumlah dan luasan penambangan liar yang dilakukan di beberapa lokasi sungai dan pesisir dari 22 lokasi dengan luasan \pm 12.500 m² menjadi 15 lokasi dengan luasan dibawah 10.000 m².

4.5 Strategi Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran, dengan dilandasi Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

- a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi.
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi untuk mencapai misi Kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2011 sebagai berikut :

- 4.1. Strategi untuk mencapai misi pertama : Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan.
 2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

- 4.2. Strategi untuk mencapai misi kedua : Meningkatkan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) aparatur.
 1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.
 2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.
- 4.3. Strategi untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 1. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
 2. Pengembangan perekonomian pedesaan.
- 4.4. Strategi untuk mencapai misi keempat : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
 2. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana alam.
 3. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4.5. Strategi untuk mencapai misi kelima : Mengembangkan perekonomian rakyat terutama agribisnis dan pariwisata.
 1. Pengembangan agribisnis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
 2. Pengembangan kepariwisataan dan budaya daerah.
 3. Peningkatan sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian daerah.
- 4.6. Strategi untuk mencapai misi keenam : Memfasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah.
 1. Peningkatan investasi daerah dan pengembangan UMKM dan koperasi.
 2. Pengembangan dunia usaha, perdagangan dan perindustrian.
- 4.7. Strategi untuk mencapai misi ketujuh : Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan.
 1. Peningkatan keadaan dan kondisi tentram dan tertib dalam masyarakat.
 2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi sarana prasarana peribadatan.
- 4.8. Strategi untuk mencapai misi kedelapan : Melestarikan budaya dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
 1. Pelestarian nilai-nilai budaya.
 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Untuk menciptakan kondisi keuangan

daerah yang diharapkan, keuangan harus dikelola secara tertib, taat Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien merupakan prasyarat penting tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang mendukung, belanja-belanja prioritas dapat diberikan alokasi dana yang cukup, sehingga potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dibagi dalam tiga kegiatan besar yang meliputi :

a) Penyusunan dan Penetapan APBD

APBD sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah, merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

b) Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat narasi untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

Adanya keadaan yang disebabkan asumsi yang dipakai pada saat penyusunan tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak, kepentingan melakukan pergeseran anggaran, serta kepentingan untuk memanfaatkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya agar dapat dimanfaatkan lebih optimal.

c) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai waktu yang ditetapkan dengan format yang sesuai ketentuan.

Dalam optimalisasi perolehan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan inefisiensi biaya, sehingga diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dari yang sewajarnya.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Rendahnya potensi sumber pendapatan.

- b. Belum optimal pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

5.1 ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan secara signifikan dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan, meneliti dan mengkaji potensi pendapatan, eksplorasi potensi serta menerapkan manajemen keuangan yang efektif. Untuk lebih mempercepat pertumbuhan pendapatan daerah dilakukan dengan melaksanakan program pengembangan usaha daerah, baik melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dengan menambah permodalan maupun mengupayakan informasi melalui berbagai sumber dari pemerintah agar diperoleh perkiraan penerimaan daerah yang lebih dini, sehingga penerimaan dapat segera diketahui lebih pasti.

Guna lebih memperkuat posisi pendanaan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, perlu dikaji lebih lanjut sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lunak.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2001-2005 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

| No | Tahun Anggaran | Realisasi PAD (Rp) | | | | | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Perusda & HPKDD | Lain-lain Pendapatan yang sah | Jumlah PAD | |
| 1 | 2001 | 901.980.000 | 6.694.570.000 | 611.060.000 | 1.925.340.000 | 10.132.950.000 | |
| 2 | 2002 | 1.396.710.000 | 7.778.220.000 | 778.180.000 | 6.272.400.000 | 16.225.510.000 | 60,13 |
| 3 | 2003 | 2.067.040.000 | 9.247.560.000 | 1.066.670.000 | 5.869.640.000 | 18.250.910.000 | 12,48 |
| 4 | 2004 | 2.325.070.000 | 12.395.090.000 | 1.895.760.000 | 3.219.040.000 | 19.834.960.000 | 8,68 |
| 5 | 2005 | 2.488.960.000 | 16.216.180.000 | 2.580.920.000 | 3.046.440.000 | 24.332.500.000 | 22,67 |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

Dengan asumsi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 rata-rata tingkat pertumbuhan 20,79% maka prediksi PAD kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Prediksi Pendapatan Asli Daerah

| No | Tahun Anggaran | Prediksi PAD (Rp) | | | | Pertumbuhan (%) | |
|----|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| | | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Perusda & HPKDD | Lain-lain Pendapatan yang sah | | Jumlah PAD |
| 1 | 2006 | 3.006.414.784 | 19.587.523.822 | 3.117.493.268 | 3.679.794.876 | 29.391.226.750 | 20,79 |
| 2 | 2007 | 3.631.448.418 | 23.659.770.025 | 3.765.620.118 | 4.444.824.231 | 35.501.662.791 | 20,79 |
| 3 | 2008 | 4.386.426.544 | 28.578.636.213 | 4.548.492.541 | 5.368.903.188 | 42.882.458.486 | 20,79 |
| 4 | 2009 | 5.298.364.622 | 34.520.134.681 | 5.494.124.140 | 6.485.098.161 | 51.797.721.605 | 20,79 |
| 5 | 2010 | 6.399.894.627 | 41.696.870.682 | 6.636.352.549 | 7.833.350.069 | 62.566.467.926 | 20,79 |
| 6 | 2011 | 7.730.432.720 | 50.365.650.096 | 8.016.050.244 | 9.461.903.548 | 75.574.036.608 | 20,79 |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain yang sah dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun Anggaran | REALISASI PENDAPATAN (Rp. 000) | | | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (APBD) | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | PAD | DANA PERIMBANGAN | LAIN-LAIN YANG SAH | JUMLAH | | | |
| 1 | 2001 | 10.132.950 | 199.357.800 | 7.401.390 | 221.037.340 | - | 221.037.340 | |
| 2 | 2002 | 16.225.510 | 218.030.390 | 17.375.820 | 251.631.720 | 32.017.770 | 283.649.490 | 28,33 |
| 3 | 2003 | 18.250.910 | 241.450.770 | 26.941.560 | 286.643.240 | 51.443.320 | 338.086.560 | 19,19 |
| 4 | 2004 | 19.834.960 | 248.864.580 | 27.869.570 | 296.569.110 | 42.048.640 | 338.617.750 | 0,16 |
| 5 | 2005 | 24.332.500 | 268.068.880 | 15.389.320 | 307.790.700 | 17.124.690 | 324.915.390 | (4,05) |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

Dengan asumsi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata tingkat pertumbuhan 8,73 % maka prediksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2006–2011 dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Prediksi Pendapatan Daerah

| No | Tahun Anggaran | Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo | | | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (APBD) | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|--|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | PAD | DANA PERIMBANGAN | LAIN-LAIN YANG SAH | JUMLAH | | | |
| 1 | 2006 | 29.391.227 | 411.311.701 | 1.856.826 | 442.559.754 | 10.538.039 | 453.097.794 | |
| 2 | 2007 | 35.501.663 | 447.219.213 | 2.018.927 | 484.739.803 | 11.458.010 | 496.197.813 | 9,51 |
| 3 | 2008 | 42.882.458 | 486.261.450 | 2.195.180 | 531.339.088 | 12.458.294 | 543.797.383 | 9,59 |
| 4 | 2009 | 51.797.722 | 528.712.075 | 2.386.819 | 582.896.615 | 13.545.904 | 596.442.519 | 9,68 |
| 5 | 2010 | 62.566.468 | 574.868.639 | 2.595.188 | 640.030.295 | 14.728.461 | 654.758.756 | 9,78 |
| 6 | 2011 | 75.574.037 | 625.054.671 | 2.821.748 | 703.450.456 | 16.014.256 | 719.464.711 | 9,88 |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Salah satu faktor penting agar potensi yang dimiliki dapat diusahakan secara maksimal adalah tersedianya sumber daya dalam bentuk kemampuan keuangan. Semakin besar kemampuan pendanaan yang dimiliki semakin besar pula kesempatan memanfaatkan aset dengan optimal.

Dana yang dimiliki selain untuk memenuhi belanja wajib, penggunaan dana diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja program/kegiatan sebagaimana yang tertuang pada belanja Prioritas. Untuk memberikan deskripsi besarnya dana yang dibelanjakan, berikut ini disajikan tabel realisasi belanja sebelum tahun anggaran 2006.

Tabel 5.5
Realisasi Belanja Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun Anggaran | Realisasi | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2001 | 234.251.297.556,01 | |
| 2 | 2002 | 248.670.968.622,07 | 6,16 |
| 3 | 2003 | 282.170.746.713,20 | 13,47 |
| 4 | 2004 | 311.299.867.330,10 | 10,32 |
| 5 | 2005 | 307.526.546.189,49 | (1,21) |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

Dengan asumsi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata tingkat pertumbuhan 5,75% maka prediksi belanja kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Prediksi Belanja Kabupaten Kulon Progo

| No | Tahun Anggaran | Prediksi | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2006 | 458.909.842.112 | |
| 2 | 2007 | 485.297.158.033 | 5,75 |
| 3 | 2008 | 513.201.744.620 | 5,75 |
| 4 | 2009 | 542.710.844.936 | 5,75 |
| 5 | 2010 | 573.916.718.520 | 5,75 |
| 6 | 2011 | 606.916.929.835 | 5,75 |

Sumber data : BPKD Kab. Kulon Progo

Agar terjadi peningkatan efektivitas belanja daerah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan alokasi dana yang proporsional untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam.

- b. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah yang lebih baik dengan penerapan sistem akuntansi yang mendukung penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas pencatatan (pembukuan dan pelaporan) serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- d. Dalam penerapan belanja daerah berpedoman pada asas efektif, efisien, dan ekonomis, serta untuk mendanai urusan wajib, urusan pilihan, urusan tertentu berupa kerjasama yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam pencapaian prestasi kerja sesuai kebutuhan yang terukur.

5.3 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Optimalisasi pengelolaan keuangan ditentukan oleh kebijakan yang dilaksanakan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh sinergi yang optimal.

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, kewenangan yang ada serta kendala yang dihadapi, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil kebijakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan yang terintegrasi dengan pemerintah atasan yang lebih tinggi. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, taat perundang-undangan serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang ada maka kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai tingkatan standar yang dibutuhkan.
- b. Meningkatkan sarana kerja yang mendukung dengan berbasis teknologi.
- c. Menekan/ meminimalisir tingkat kebocoran pendapatan.
- d. Pemantauan benda berharga yang telah diperforasi
- e. Meningkatkan kualitas pembukuan dan pelaporan.
- f. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- g. Meminimalkan tagihan pajak daerah.
- h. Meminimalkan keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- i. Mengoptimalkan sumbangan pihak ketiga.
- j. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
- k. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- l. Memaksimalkan pencapaian target APBD.
- m. Menyelesaikan pokok angsuran tepat waktu.
- n. Menyediakan data yang valid dan akurat
- o. Melakukan efisiensi belanja daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju sejahtera dan mandiri.

Agar dalam pembangunan daerah terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah kebijakan umum pembangunan daerah yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi.
- b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijamin melalui mekanisme formal.
- c) Prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan urusan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/Instansi.
- d) Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumberdaya alam yang ada dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Renstra SKPD, dan Renja SKPD, termasuk **program-program di SKPD yang bersifat rutin setiap tahun** akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arah Kebijakan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2006-2011 secara umum adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

6.1. Misi Pertama: Peningkatan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada rakyat/ masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi ke-1: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah.

2. Penataan peraturan perundang-undangan.

Strategi ke-2 : Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Kebijakan

1. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangaunan.
3. Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

6.2. Misi Kedua: Peningkatan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) aparatur.

Strategi ke-1 : Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan desa.

Strategi ke-2 : Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Kebijakan:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan pengawasan internal.
3. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi, komunikasi dan meda massa.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan kependudukan serta kearsipan.

6.3. Misi Ketiga : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Strategi ke-1: Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan

1. Meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rangka partisipasi pembangunan.
2. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana.
3. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Strategi ke-2: Pengembangan perekonomian pedesaan.

Kebijakan

1. Mengembangkan perekonomian pedesaan.

6.4. Misi Keempat: Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Strategi ke-1: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Strategi ke-2: Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana alam.

Kebijakan:

1. Meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana alam.

Strategi ke-3: Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial.

6.5. Misi Kelima: Pengembangan perekonomian rakyat terutama agribisnis, agroindustri dan pariwisata.

Strategi ke-1: Pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan:

1. Meningkatkan produktivitas petani dan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan produk peternakan.
3. Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
4. Meningkatkan pengembangan produk perikanan dan kelautan.

Strategi ke-2 : Pengembangan kepariwisataan dan budaya daerah.

Kebijakan:

1. Mengembangkan kepariwisataan daerah.
2. Mengembangkan budaya daerah.

Strategi ke-3: Peningkatan sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian daerah.

Kebijakan:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana umum.
2. Mengembangkan pelayanan angkutan.

6.6. Misi Keenam: Fasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah.

Strategi ke-1: Peningkatan investasi daerah dan pengembangan UMKM dan koperasi.

Kebijakan:

1. Mengembangkan penanaman modal dan investasi daerah.
2. Mengembangkan UMKM dan koperasi.

Strategi ke-2: Pengembangan dunia usaha, perdagangan, perindustrian dan jasa

Kebijakan:

1. Mengembangkan dunia usaha, perdagangan dan jasa
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri.

6.7. Misi Ketujuh: Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan.

Strategi ke-1 : Peningkatan keadaan dan kondisi tentram dan tertib dalam masyarakat.

Kebijakan:

1. Meningkatkan keterampilan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengembangkan wawasan dan kebangsaan dan ketahanan daerah.

Strategi ke-2 : Peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Kebijakan:

1. Meningkatkan toleransi, rasa solidaritas, kerukunan dan kualitas kehidupan beragama.

6.8. Misi Kedelapan : Melestarikan nilai budaya dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Strategi ke-1: Pelestarian nilai-nilai budaya.

Kebijakan:

1. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah

Strategi ke-2 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Misi Pertama

Strategi ke-1: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah.

Program

1. Program penataan kelembagaan.
2. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat di daerah.
3. Program pengembangan kapasitas otonomi daerah.
4. Program penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
6. Program peningkatan peran dan fungsi kelembagaan dan pemerintahan daerah.
7. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Arah kebijakan: Penataan peraturan perundang-undangan.

Program

1. Program penataan peraturan perundang-undangan.

Strategi ke-2: Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Arah kebijakan: Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.

Program

1. Program perencanaan tata ruang.
2. Program pemanfaatan ruang.
3. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Program

1. Program pengembangan data/informasi/statistik pembangunan.
2. Program kerjasama pembangunan.
3. Program perencanaan pembangunan daerah.
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
5. Program perencanaan sosial budaya.
6. Program perencanaan pembangunan daerah rawan.

Arah kebijakan: Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Program

1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

7.2 Misi Kedua

Strategi ke-1: Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan desa.

Program

1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. Program pendidikan kedinasan.
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Strategi ke-2: Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Arah kebijakan

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah.

Program

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan pengawasan internal.

Program

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.
3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Arah kebijakan

Meningkatkan pengembangan teknologi informasi, komunikasi dan media massa.

Program

1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
2. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
4. Program pengembangan komunikasi, informatika, dan media massa.
5. Program kerjasama informasi dengan media massa.

Arah kebijakan

Mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan kependudukan serta kearsipan.

Program

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
3. Program penataan administrasi kependudukan.

7.3 Misi Ketiga

Strategi ke-1: Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rangka partisipasi pembangunan.

Program

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Arah kebijakan: Meningkatkan pelayanan keluarga berencana.

Program

1. Program keluarga berencana.
2. Program kesehatan reproduksi remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi.
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB-KR yang mandiri.
5. Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR.
7. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS.

8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
10. Program pengembangan model operasional BKB/posyandu-padu.

Arah kebijakan: Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Program

1. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Arah kebijakan: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Program

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.

Strategi ke-2: Pengembangan perekonomian pedesaan.

Arah kebijakan

Mengembangkan perekonomian pedesaan.

Program

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
2. Program pengembangan ekonomi pedesaan.

7.4 Misi keempat

Strategi ke-1: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas pendidikan.

Program

1. Program pendidikan anak usia dini.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
7. Program pengembangan pelayanan perpustakaan.
8. Program pengembangan bahan pustaka
9. Program pengembangan perpustakaan.

Arah kebijakan: Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Program

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.

2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program pengawasan obat dan makanan.
4. Program pengembangan obat asli Indonesia.
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Program perbaikan gizi masyarakat.
7. Program pengembangan lingkungan sehat.
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
11. Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
12. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
16. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
17. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
18. Program penelitian dan pengembangan kesehatan.

Strategi ke-2: Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana alam.

Arah kebijakan: Meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana alam.

Program

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
2. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
4. Program pengendalian banjir.

Strategi ke-3: Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan: Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Program

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Program peningkatan kesempatan kerja
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
4. Program pengembangan wilayah transmigrasi.
5. Program transmigrasi lokal.
6. Program stimulasi kewirausahaan melalui penyediaan bahan pustaka teknologi tepat guna berbasis masyarakat pedesaan.

Arah Kebijakan: Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Program

1. Program pemberdayaan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Pembinaan panti asuhan/ panti jompo.
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

7.5 Misi Kelima

Strategi ke-1: Pengembangan agribisnis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Arah kebijakan: Meningkatkan produktivitas petani dan ketahanan pangan.

Program

1. Program peningkatan kesejahteraan petani.
2. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Arah kebijakan: Meningkatkan produk peternakan.

Program

1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
3. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

Arah kebijakan: Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Program

1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
2. Program pembinaan dan penertian industri hasil hutan.

Arah kebijakan: Meningkatkan pengembangan produksi perikanan dan kelautan.

Program

1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Program pengembangan budidaya perikanan.
3. Program pengembangan perikanan tangkap

Strategi ke-2 : Pengembangan kepariwisataan dan budaya daerah.

Arah kebijakan : Mengembangkan kepariwisataan daerah.

Program

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
2. Program pengembangan destinasi pariwisata.
3. Program pengembangan kemitraan.

Arah kebijakan : Mengembangkan budaya daerah.

Program

1. Program pengelolaan kekayaan budaya.
2. Program pengelolaan keragaman budaya.

Strategi ke-3: Peningkatan sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian daerah.

Arah kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasaran umum.

Program

1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
6. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
8. Program peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor.
9. Program pengembangan jasa konstruksi.

Arah kebijakan : Mengembangkan pelayanan angkutan.

Program

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan.
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

7.6 Misi Keenam

Strategi ke-1: Peningkatan investasi daerah dan pengembangan UMKM dan koperasi.

Arah kebijakan: Mengembangkan penanaman modal dan investasi daerah.

Program

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Arah kebijakan: Mengembangkan UMKM dan koperasi.

Program

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
4. Program peningkatan kualitas SDM koperasi.
5. Program peningkatan kualitas organisasi, manajemen dan usaha dan keuangan koperasi.
6. Program pelayanan badan hukum koperasi.

Strategi ke-2: Pengembangan dunia usaha, perdagangan dan perindustrian.

Arah kebijakan: Mengembangkan dunia usaha dan perdagangan.

Program

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
4. Program dan penataan pedagang pasar umum.

Arah kebijakan: Pembinaan dan pengawasan terhadap industri.

Program

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
4. Program pelayanan prima.

7.7 Misi Ketujuh

Strategi ke-1 : Peningkatan keadaan dan kondisi tentram dan tertib dalam masyarakat.

Arah kebijakan: Meningkatkan keterampilan dan ketertiban masyarakat.

Program

1. Program peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan.
3. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Arah kebijakan : Mengembangkan wawasan kebangsaan dan ketahanan daerah.

Program

1. Program pendidikan politik masyarakat.
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Pengembangan ketahanan dan penyelesaian masalah di daerah.

Strategi ke-2 : Peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Arah kebijakan : Meningkatkan toleransi, rasa solidaritas dan kualitas kerukunan kehidupan beragama.

Program

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

4. Program fasilitasi forum solidaritas dan kerukunan beragama

7.8 Misi Kedelapan

Strategi ke-1 : Pelestarian nilai-nilai budaya

Arah kebijakan : Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah
Program

1. Program pengembangan nilai budaya.

Strategi ke-2 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan.
Program

1. Program pengembangan kinerja dan pengelolaan sampah.
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan : Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam.
Program

1. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.
3. Program peningkatan pengendalian polusi.
4. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
6. Program pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Renstra SKPD, dan Renja SKPD serta dalam Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8.1. Program Transisi

RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo 2006-2011 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Kepala Daerah terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Daerah ini berakhir sampai dengan tahun 2011. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 diharapkan pada tahun 2011 sudah mulai disiapkan dokumen RPJM Daerah serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2011 nanti untuk menyusun RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 serta rencana kerja pemerintah tahun 2012, maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2011 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2012.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kulon Progo periode 2006-2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 merupakan pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas/Badan/Kantor dan merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, Kantor serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas, Badan, Kantor berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Badan, Kantor yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/Badan/Kantor;
3. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 dengan Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011 ke dalam rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD.

Wates, 18 Juli 2007
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

